



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2019.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019 yang selanjutnya disebut RAN-PPDT Tahun 2019.
- (2) RAN-PPDT Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

RAN-PPDT Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan dalam penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2019 terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 3

RAN-PPDT memuat:

- a. pendahuluan;
- b. isu strategis dan prioritas penanganan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- c. sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- d. strategi dan arah kebijakan; dan
- e. program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal dan menteri atau pimpinan Instansi Pusat harus melaksanakan RAN-PPDT yang tertuang dalam rencana kerja masing-masing Instansi Pusat.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal dan menteri atau pimpinan Instansi Pusat dalam melaksanakan RAN-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- (3) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 5

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal dapat melakukan pemutakhiran RAN-PPDT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan RAN-PPDT Tahun 2019 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2019

RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL TAHUN 2019

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Isu Strategis dan Prioritas Penanganan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
 - C. Penyebab Ketertinggalan Daerah
- BAB II SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PER WILAYAH
- A. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua
 - B. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku
 - C. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara
 - D. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi
 - E. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Kalimantan
 - F. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Jawa
 - G. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera
- BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
- A. Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua
 - B. Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku
 - C. Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara
 - D. Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi
 - E. Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Kalimantan
 - F. Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Jawa
 - G. Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera
- BAB IV PENUTUP

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) mengamanatkan pentingnya keberpihakan dan penajaman terhadap PDT di bidang perencanaan dan pendanaan serta pelaksanaan PDT.

Keberpihakan di bidang perencanaan berupa penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 telah ditetapkan berbagai kebijakan dan sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 antara lain mengentaskan 80 kabupaten dari 122 daerah tertinggal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Untuk melaksanakan kebijakan dan pencapaian sasaran di atas, maka dibutuhkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nasional (RAN-PPDT) sebagai dokumen perencanaan tahunan PDT yang disusun dengan memperhatikan STRANAS-PPDT dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di 122 kabupaten daerah tertinggal yang memiliki keterpaduan program kegiatan dan sinergitas lintas Kementerian/Lembaga, maka disusun dokumen Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2019.

B. Isu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. Isu Strategis dan Prioritas Penanganan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Dalam STRANAS-PPDT Tahun 2015-2019 dijelaskan bahwa sasaran nasional PPDT tahun 2019 adalah meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9% (enam koma sembilan persen) sampai 7,1% (tujuh koma satu persen). Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal tahun 2017 diestimasi di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07% kecuali daerah tertinggal di Pulau Jawa yakni dengan rata-rata 4,58%. Walaupun demikian, terdapat beberapa daerah tertinggal yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah angka yang ditargetkan dalam STRANAS-PPDT Tahun 2015-2019 yakni daerah-daerah tertinggal di Pulau Sumatera (tahun 2017 ditargetkan 6,23% sedangkan realisasi 5,65%) dan Kalimantan (target tahun 2017 adalah 5,63% sedangkan realisasi 5,50%).

Sasaran nasional menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal tahun 2019 menjadi 15% (lima belas persen) sampai 15,5% (lima belas koma lima persen) sedangkan realisasi pada tahun 2017 di daerah tertinggal pada tahun 2017 masih tinggi yakni sebesar 18,04%. Persentase penduduk miskin paling tinggi terdapat di Wilayah Papua yang mencapai 31,02% pada tahun 2017. Capaian ini masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional yang sudah dapat ditekan pada angka 10,12%.

Isu lainnya terkait Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya daerah-daerah tertinggal di Wilayah Papua (dengan rata-rata indeks tahun 2017 yakni 54,82) dan Nusa Tenggara (dengan rata-rata indeks tahun 2017 yakni 62,72) sedangkan angka IPM nasional tahun 2017 adalah 70,81 dan sasaran dalam STRANAS-PPDT Tahun 2015-2019 adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal menjadi 62,78.

Untuk mencapai sasaran PPDT maka diperlukan penentuan prioritas penanganan percepatan pembangunan daerah tertinggal yakni merujuk pada penyebab utama ketertinggalan daerah dengan memperhatikan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

C. Penyebab ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

C. Penyebab Ketertinggalan Daerah

Daftar penyebab utama ketertinggalan di 7 (tujuh) wilayah akan ditunjukkan dalam Tabel 1 sampai dengan Tabel 7 berikut ini.

Tabel 1
Daftar Kabupaten Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan
Wilayah Papua Tahun 2019

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Ketertinggalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
1	Teluk Wondama	Papua Barat	Ekonomi	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	Sumber Daya Manusia	-
2	Teluk Bintuni		Aksesibilitas	Ekonomi	Karakteristik Daerah	-	-	-
3	Sorong Selatan		Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keu. Daerah	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	-
4	Sorong		Ekonomi	Aksesibilitas	-	-	-	-
5	Raja Ampat		Aksesibilitas	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	-	-	-
6	Tambrauw		Ekonomi	Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	-	-
7	Maybrat		Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keu. Daerah	-	-	-
8	Merauke	Papua	Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-	-
9	Jayawijaya		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	-	-
10	Nabire		Aksesibilitas	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	-
11	Kepulauan Yapen		Ekonomi	Kemampuan Keu. Daerah	Aksesibilitas	-	-	-
12	Biak Numfor		Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keu. Daerah	-	-	-
13	Paniai		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah
14	Puncak Jaya		Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	-	-
15	Boven Digoel		Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	-	-	-
16	Mappi		Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-	-
17	Asmat		Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	-
18	Yahukimo		Aksesibilitas	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	-	-
19	Pegunungan Bintang		Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Ketertinggalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
20	Tolikara		Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	-	-
21	Sarmi		Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	-	-	-
22	Keerom		Aksesibilitas	Ekonomi	Kemampuan Keu. Daerah	Sumber Daya Manusia	-	-
23	Waropen		Aksesibilitas	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	-
24	Supiori		Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	Sumber Daya Manusia	-
25	Mamberamo Raya		Aksesibilitas	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	-	-	-
26	Nduga		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	Kemampuan Keu. Daerah	-
27	Lanny Jaya		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	-	-
28	Mamberamo Tengah		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	-	-
29	Yalimo		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	-	-
30	Puncak		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	-	-
31	Dogiyai		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah
32	Intan Jaya		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	-
33	Deiyai		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	-	-

Tabel 2
Daftar Kabupaten Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan
Wilayah Maluku Tahun 2019

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Ketertinggalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
1	Maluku Tenggara Barat	Maluku	Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keu. Daerah	Sumber Daya Manusia	-	-
2	Maluku Tengah		Aksesibilitas	Ekonomi	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	-	-
3	Buru		Ekonomi	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	-
4	Kepulauan Aru		Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	Sarana dan Prasarana	-
5	Seram Bagian Barat		Ekonomi	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	-
6	Seram Bagian Timur		Ekonomi	Aksesibilitas	Kemampuan Keu. Daerah	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah

7. Maluku ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Keteringgalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
7	Maluku Barat Daya		Aksesibilitas	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah
8	Buru Selatan		Aksesibilitas	Kemampuan Keu. Daerah	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	-
9	Halmahera Barat	Maluku Utara	Karakteristik Daerah	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-
10	Kepulauan Sula		Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	Sarana dan Prasarana	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	-
11	Halmahera Selatan		Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	-
12	Halmahera Timur		Ekonomi	Karakteristik Daerah	Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	-
13	Pulau Morotai		Ekonomi	Karakteristik Daerah	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	-	-
14	Pulau Taliabu		Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia

Tabel 3
Daftar Kabupaten Tertinggal dan Penyebab Utama Keteringgalan Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2019

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Keteringgalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
1	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	-	-	-
2	Lombok Tengah		Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	-	-	-
3	Lombok Timur		Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	Ekonomi	-	-
4	Sumbawa		Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	-	-	-	-
5	Dompu		Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	-	-	-
6	Bima		Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	Sarana dan Prasarana	Ekonomi	-
7	Sumbawa Barat		Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	-	-	-
8	Lombok Utara		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	Sarana dan Prasarana	-
9	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	-	-
10	Sumba Timur		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Karakteristik Daerah	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	Aksesibilitas
11	Kupang		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	Sarana dan Prasarana	-

12. Timor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Keteringgalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
12	Timor Tengah Selatan		Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah
13	Timor Tengah Utara		Ekonomi	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	-	-	-
14	Belu		Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-
15	Alor		Ekonomi	Kemampuan Keu. Daerah	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	Aksesibilitas	-
16	Lembata		Ekonomi	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	Sumber Daya Manusia	-	-
17	Ende		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	-	-
18	Manggarai		Ekonomi	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	-
19	Rote Ndao		Ekonomi	Kemampuan Keu. Daerah	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	-	-
20	Manggarai Barat		Ekonomi	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	Sarana dan Prasarana
21	Sumba Tengah		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Kemampuan Keu. Daerah	Sarana dan Prasarana	-	-
22	Sumba Barat Daya		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	-	-
23	Nagekeo		Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	Ekonomi	-	-
24	Manggarai Timur		Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	-
25	Sabu Raijua		Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	-	-
26	Malaka		Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	-

Tabel 4
Daftar Kabupaten Tertinggal dan Penyebab Utama Keteringgalan
Wilayah Sulawesi Tahun 2019

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Keteringgalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
1	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	Ekonomi	-	-	-
2	Donggala		Karakteristik Daerah	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	-
3	Toli-toli		Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	-	-	-
4	Buol		Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	-	-

5. Parigi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

5	Parigi Moutong		Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	Sarana dan Prasarana	-
6	Tojo Una-una		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	-	-
7	Sigi		Karakteristik Daerah	Ekonomi	Kemampuan Keu. Daerah	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas
8	Banggai Laut		Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	Ekonomi	-	-	-
9	Morowali Utara		Kemampuan Keu. Daerah	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	-	-	-
10	Jeneponto	Sulawesi Selatan	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	-	-	-
11	Konawe	Sulawesi Tenggara	Kemampuan Keu. Daerah	Ekonomi	-	-	-	-
12	Bombana		Kemampuan Keu. Daerah	Ekonomi	-	-	-	-
13	Konawe Kepulauan		Kemampuan Keu. Daerah	Ekonomi	-	-	-	-
14	Boalemo	Gorontalo	Ekonomi	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	-	-	-
15	Pohuwato		Ekonomi	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	-	-	-
16	Gorontalo Utara		Kemampuan Keu. Daerah	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Karakteristik Daerah	-	-
17	Polewali Mandar	Sulawesi Barat	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	Sarana dan Prasarana	-	-	-
18	Mamuju Tengah		Kemampuan Keu. Daerah	Sarpras	-	-	-	-

Tabel 5
Daftar Kabupaten Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan Wilayah Kalimantan Tahun 2019

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Ketertinggalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
1	Sambas	Kalimantan Barat	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	-	-	-
2	Bengkayang		Kemampuan Keu. Daerah	Sarana dan Prasarana	-	-	-	-
3	Landak		Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	Aksesibilitas	Kemampuan Keu. Daerah	Ekonomi	-
4	Ketapang		Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	Sumber Daya Manusia	-	-
5	Sintang		Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	-	-	-	-
6	Kapuas Hulu		Aksesibilitas	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	-	-

7. Melawi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Ketertinggalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
7	Melawi		Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	Ekonomi	Aksesibilitas	-
8	Kayong Utara		Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	-	-	-	-
9	Seruyan	Kalimantan Tengah	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	-	-	-	-
10	Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	-	-	-
11	Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	-	-	-	-
12	Nunukan	Kalimantan Utara	Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	-	-	-

Tabel 6
Daftar Kabupaten Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan Wilayah Jawa Tahun 2019

No.	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Ketertinggalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
1	Bondowoso	Jawa Timur	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	-	-	-	-
2	Situbondo		Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	-	-
3	Bangkalan		Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-
4	Sampang		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Kemampuan Keu. Daerah	-	-	-
5	Pandeglang	Banten	Sumber Daya Manusia	Sarana dan Prasarana	Karakteristik Daerah	-	-	-
6	Lebak		Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	Sarana dan Prasarana	-	-	-

Tabel 7
Daftar Kabupaten Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan Wilayah Sumatera Tahun 2019

No	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Ketertinggalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
1	Aceh Singkil	Aceh	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	-	-
2	Nias	Sumatera Utara	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	Ekonomi	-	-	-
3	Nias Selatan		Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Ekonomi	Kemampuan Keu. Daerah	-	-

4. Nias ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Kabupaten	Provinsi	Penyebab Utama Keteringgalan Menurut Urutan					
			1	2	3	4	5	6
4	Nias Utara		Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	Karakteristik Daerah	-	-
5	Nias Barat		Ekonomi	Sarana dan Prasarana	Kemampuan Keu. Daerah	Sumber Daya Manusia	Karakteristik Daerah	-
6	Solok Selatan	Sumatera Barat	Karakteristik Daerah	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	-	-	-
7	Kep. Mentawai		Aksesibilitas	Sarana dan Prasarana	Ekonomi	Karakteristik Daerah	Kemampuan Keu. Daerah	-
8	Pasaman Barat		Karakteristik Daerah	Sarana dan Prasarana	Sumber Daya Manusia	Kemampuan Keu. Daerah	-	-
9	Musi Rawas	Sumatera Selatan	Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-	-	-
10	Musi Rawas Utara		Sumber Daya Manusia	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-	-	-
11	Seluma	Bengkulu	Ekonomi	Kemampuan Keu. Daerah	Sumber Daya Manusia	-	-	-
12	Lampung Barat	Lampung	Kemampuan Keu. Daerah	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-	-	-
13	Pesisir Barat		Kemampuan Keu. Daerah	Ekonomi	Sarana dan Prasarana	-	-	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB II

SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI WILAYAH PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- A. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua
1. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua

Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua pada tahun 2019 adalah:

 - a. meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,37%;
 - b. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 19,08%; dan
 - c. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal menjadi 55,50.
 2. Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Papua

Isu pembangunan daerah tertinggal di wilayah Papua ada pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, dan tingginya persentase penduduk miskin. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua difokuskan pada penyebab ketertinggalan masing-masing kabupaten daerah tertinggal. Untuk mencapai sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Papua, kebijakan yang diambil diutamakan untuk:

 - a. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di kabupaten daerah tertinggal di wilayah Papua. Pemenuhan kebutuhan dasar ini ditujukan untuk mendukung pengembangan wilayah Papua;
 - b. mengembangkan potensi lokal yang ada di kabupaten daerah tertinggal di wilayah Papua melalui pengembangan perekonomian masyarakat yakni pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengembangan ekonomi kemaritiman;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang antara lain infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang promosi dan peningkatan daya saing produk lokal, infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah terisolir ke pusat pertumbuhan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah;
 - d. meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, dan kesehatan; dan
 - e. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia agar memiliki kesehatan dan daya saing yang lebih baik.
3. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua
- a. Perekonomian Masyarakat
 - 1) Memberikan fasilitasi pengembangan pertanian dan perkebunan;
 - 2) memberikan kepastian pasar kepada pelaku usaha kecil menengah melalui pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan;
 - 3) mendorong investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan, pertanian, dan peternakan secara terintegrasi mulai dari hulu-hilir hingga pemasaran produk;
 - 4) mengembangkan dan meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru dan pengembangan potensi lokal untuk menciptakan wirausaha baru;
 - 5) memberikan edukasi mengenai ekonomi kreatif terhadap pelaku usaha kecil menengah di wilayah Papua untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal; dan
 - 6) meningkatkan aksesibilitas terhadap infrastruktur pendukung pengembangan perekonomian masyarakat antara lain akses ke pasar, dermaga penangkapan ikan, dan sebagainya.
 - b. Sumber Daya Manusia
 - 1) meningkatkan kualitas sumberdaya kependidikan melalui pembinaan guru pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kejuruan;
 - 2) meningkatkan daya saing masyarakat dalam hal kemampuan dan kompetensi kerja masyarakat dengan cara mengembangkan standardisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja untuk masyarakat daerah tertinggal di wilayah Papua;
 - 3) meningkatkan pelayanan pendidikan keagamaan;
 - 4) memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- 4) memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung; dan
 - 5) meningkatkan pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- c. Sarana dan Prasarana
- 1) membina dan mengembangkan kawasan permukiman dalam rangka menciptakan permukiman layak huni;
 - 2) memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan sesuai dengan karakteristik setiap daerah di kabupaten daerah tertinggal wilayah Papua;
 - 3) memenuhi sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi melalui penyediaan stasiun pemancar atau *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah nirsinyal (*blankspot*) layanan telekomunikasi, dan penyediaan akses jaringan internet;
 - 4) pembangunan sarana dan prasarana air bersih sehat di seluruh kampung, terutama di wilayah terisolir dan perbatasan antara lain sumber air reverse osmosis, dan pembangunan embung atau bangunan penampung air lainnya;
 - 5) membangun dan meningkatkan jalan penghubung antar wilayah terutama wilayah terisolir ke pusat-pusat pertumbuhan; dan
 - 6) meningkatkan perencanaan, pembangunan dan pengawasan infrastruktur energi baru, terbarukan dan konservasi energi.
- d. Kemampuan Keuangan Daerah
- 1) meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan lain yang sah;
 - 2) menguatkan kapasitas dan kelembagaan daerah dalam rangka penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - 3) menguatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 3) menguatkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif; dan
- 4) memperbaiki sistem penerimaan pajak dan retribusi.

e. Aksesibilitas

- 1) mendukung pengembangan bandar udara keperintisan melalui subsidi angkutan udara perintis;
- 2) meningkatkan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan pengelolaan sarana perhubungan darat, air, dan udara;
- 3) membangun jalan akses menuju ke sarana perhubungan baru; dan
- 4) meningkatkan prasarana perhubungan dan pengadaan moda transportasi bagi wilayah terisolir.

f. Karakteristik Daerah

- 1) meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui edukasi masyarakat dan pemerintah tanggap bencana;
- 2) meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan ramah lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
- 3) meningkatkan penanganan daerah pasca konflik, dan penanganan daerah rawan pangan; dan
- 4) menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan daerah aliran sungai (DAS), serta pengendalian kerusakan perairan darat.

B. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku

1. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku

Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua pada tahun 2019 adalah:

- a. meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,37%;
- b. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15,53%; dan
- c. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal menjadi 64,30.

2. Arah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

2. Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Maluku

Percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Maluku diarahkan pada;

- a. mengembangkan potensi sumber daya alam unggulan yang dikelola dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan;
- b. mengembangkan potensi sumberdaya alam di kabupaten daerah tertinggal di wilayah Maluku didukung oleh percepatan promosi potensi unggulan, pengembangan kemitraan untuk mempercepat pembangunan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah;
- c. mengembangkan sumberdaya manusia dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah; dan
- d. meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar dilakukan dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, pendidikan, kesehatan, elektrifikasi, informasi dan komunikasi, sumber daya air dan peningkatan aksesibilitas.

3. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku

a. Perekonomian Masyarakat

- 1) meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil produksi pertanian dan perkebunan melalui dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- 2) mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) meningkatkan dukungan teknis pengelolaan air irigasi pertanian;
- 4) meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan potensi lokal untuk menciptakan wirausaha baru;
- 5) mengembangkan sistem dan alat pengelolaan pelabuhan perikanan, bantuan kapal penangkap, logistik hasil kelautan dan perikanan;
- 6) mengembangkan potensi lokal dengan memanfaatkan BUMDES dan produk unggulan kawasan perdesaan, serta pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal; dan
- 7) memberikan edukasi mengenai ekonomi kreatif terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah Maluku untuk meningkatkan daya saing potensi ekonomi lokal.

b. Sumber ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

b. Sumber Daya Manusia

- 1) pelatihan dan pembinaan guru pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kejuruan;
- 2) membina kerukunan hidup umat beragama;
- 3) meningkatkan standardisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja untuk masyarakat daerah tertinggal di wilayah Maluku; dan
- 4) mengembangkan pelayanan pendidikan khusus melalui pembinaan pendidikan dan layanan khusus.

c. Sarana dan Prasarana

- 1) menyediakan sarana dan prasarana pendidikan;
- 2) meningkatkan pelayanan air bersih di daerah sulit air dengan membangun sarana penampung air dan membangun sistem perpipaan air bersih di wilayah perbatasan;
- 3) meningkatkan pemasaran UMKM melalui revitalisasi pasar rakyat, membangun pasar baru di daerah yang belum memiliki pasar permanen, dan membangun akses jalan menuju pasar;
- 4) meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan/peningkatan jalan penghubung perbatasan;
- 5) memenuhi kebutuhan akan stasiun pemancar atau BTS (*Base Tranceiver Station*) di wilayah nirsinyal (*blankspot*), dan memberikan akses kepada daerah untuk tersambung secara online layanan jaringan komunikasi data; dan
- 6) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah terpencil, pulau kecil dan terluar.

d. Kemampuan Keuangan Daerah

- 1) menguatkan kapasitas dan kelembagaan daerah dalam rangka penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*);
- 2) menguatkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif;

3) meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- 3) meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan lain yang sah; dan
 - 4) memperbaiki sistem penerimaan pajak dan retribusi.
- e. Aksesibilitas
- 1) membangun dan meningkatkan sarana perhubungan darat, air, dan udara;
 - 2) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan;
 - 3) meningkatkan pengembangan bandar udara keperintisan; dan
 - 4) membangun rambu suar sebagai penunjang navigasi pelayaran.
- f. Karakteristik Daerah
- 1) pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui melalui edukasi masyarakat dan pemerintah tanggap bencana;
 - 2) meningkatkan penanganan daerah pasca konflik dan penanganan daerah rawan pangan;
 - 3) meningkatkan pengelolaan taman nasional sebagai kawasan lindung dan penyangga di kabupaten daerah tertinggal wilayah Maluku;
 - 4) menyelenggarakan pengendalian kerusakan perairan darat;
 - 5) membangun pos pengamat gunung api sebagai upaya siaga bencana alam; dan
 - 6) meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan ramah lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut.

C. Percepatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

C. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara

1. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara

Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2019 adalah:

- a. meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 5,45%;
- b. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 21,25%; dan
- c. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal menjadi 63,89.

2. Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara

Daerah tertinggal di wilayah Nusa Tenggara memiliki potensi besar di bidang pertanian dan pariwisata. Dengan memanfaatkan potensi dan melihat kondisi yang dimiliki oleh kabupaten daerah tertinggal di wilayah Nusa Tenggara, fokus arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara yaitu:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata secara terintegrasi sebagai daya tarik wilayah;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan kerja dengan cara mengembangkan perekonomian masyarakat yang berbasis pangan, dan perikanan, mulai dari sektor hulu hingga hilir yang didukung oleh bantuan pemasaran;
- c. meningkatkan sumber daya manusia dibidang pendidikan dan kesehatan, serta daya saing secara ekonomi; dan
- d. memenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik, serta pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran.

3. Strategi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

3. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara
 - a. Perekonomian Masyarakat
 - 1) meningkatkan promosi dan kemitraan dalam pengembangan potensi unggulan;
 - 2) memantapkan sistem pelatihan pertanian dan pendidikan pertanian bagi masyarakat petani;
 - 3) menerapkan hasil pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian untuk mendorong berkembangnya sektor pertanian;
 - 4) menerapkan ekonomi kemaritiman melalui pengelolaan perbenihan ikan, pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan;
 - 5) mengembangkan potensi lokal dengan perluasan kesempatan kerja dan menciptakan wirausaha baru; dan
 - 6) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan melalui peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro di kabupaten daerah tertinggal wilayah Nusa Tenggara.
 - b. Sumber Daya Manusia
 - 1) meningkatkan kapasiatas dan kualitas sumberdaya kependidikan dan kesehatan;
 - 2) mendistribusikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - 3) meningkatkan daya saing masyarakat dalam hal kemampuan dan kompetensi kerja; dan
 - 4) membina kerukunan hidup umat beragama.
 - c. Sarana dan Prasarana
 - 1) melakukan eksplorasi sumber air bersih di daerah sulit air serta pembangunan embung atau bangunan penampung air lainnya;
 - 2) membina dan mengembangkan kawasan permukiman layak huni;
 - 3) mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan di kawasan perdesaan, daerah terpencil, dan terluar;
 - 4) membangun jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah terutama wilayah terisolir; dan
 - 5) membangun tower telekomunikasi, pembangunan BTS di daerah nirsinyal (*blankspot*), membangun fasilitas internet gratis (*hotspot*) desa-desa.
 - d. Kemampuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- d. Kemampuan Keuangan Daerah
- 1) menguatkan kapasitas dan kelembagaan daerah dalam rangka penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - 2) koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antarsatuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah; dan
 - 3) peningkatan kualitas aparatur terkait pengembangan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat pada perkebunan, pangan hortikultura dan perikanan laut atau pesisir dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
- e. Aksesibilitas
- 1) meningkatkan konektivitas melalui peningkatan pelayanan angkutan udara antara lain pembangunan bandar udara, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara;
 - 2) meningkatkan konektivitas melalui pembangunan dan pengelolaan prasarana perhubungan darat;
 - 3) meningkatkan fasilitas pelabuhan; dan
 - 4) menyediakan dermaga apung serta kapal sebagai pendukung sarana perhubungan.
- f. Karakteristik Daerah
- 1) meningkatkan perlindungan kawasan konservasi keanekaragaman hayati;
 - 2) mengembangkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
 - 3) penanganan daerah pasca konflik, penanganan daerah rawan bencana, dan penanganan daerah rawan pangan;
 - 4) meningkatkan pengelolaan taman nasional secara berkelanjutan; dan
 - 5) penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan kritis, dan daerah aliran sungai (DAS).

D. Percepatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

D. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi

1. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi

Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi pada tahun 2019 adalah:

- a. meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 13,77%;
- b. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 10,41%; dan
- c. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal menjadi 65,51.

2. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi

Untuk mencapai sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Sulawesi harus dilakukan pada seluruh aspek terkait dengan sasaran, yakni dalam hal peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, pengurangan penduduk miskin, dan peningkatan IPM. Arah kebijakan yang diambil difokuskan pada;

- a. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemerataan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan;
- b. mengembangkan perekonomian masyarakat yang berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan, promosi potensi daerah tertinggal dan pengembangan kemitraan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun daerah; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, dan pengembangan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran ke pusat pertumbuhan.

3. Strategi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

3. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi

a. Perekonomian Masyarakat

- 1) mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan seperti tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar;
- 2) mengembangkan pertanian bahan pangan pokok melalui ekstensifikasi budidaya padi dan jagung;
- 3) memberikan kepastian pasar kepada pelaku usaha kecil menengah melalui pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga;
- 4) meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan wirausaha baru;
- 5) mendorong investasi dan keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal secara terintegrasi mulai dari hulu-hilir;
- 6) meningkatkan dukungan teknis pengelolaan air irigasi pertanian;
- 7) mendukung pengembangan potensi lokal pariwisata melalui pemberian bantuan untuk desa wisata berupa *homestay* dan penunjang pariwisata lainnya; dan
- 8) mengembangkan peran BUMDES dalam meningkatkan produk unggulan kawasan perdesaan dan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.

b. Sumber Daya Manusia

- 1) meningkatkan kemampuan dan kompetensi kerja masyarakat;
- 2) meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya tenaga pendidik melalui pelatihan dan pemebrian tunjangan;
- 3) memfasilitasi layanan sosial budaya bagi masyarakat;
- 4) mengelola dan membina urusan hidup beragama; dan
- 5) memberikan bantuan berupa beasiswa kepada masyarakat usia sekolah.

c. Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

c. Sarana dan Prasarana

- 1) menyediakan dan meningkatkan sarana pendidikan;
- 2) menciptakan permukiman sehat dengan penanganan permukiman kumuh, dan melengkapi kebutuhan sanitasi kawasan yang belum memiliki IPLT;
- 3) meningkatkan pelayanan air bersih di daerah sulit air;
- 4) melakukan revitalisasi pasar rakyat, membangun pasar baru di daerah yang belum memiliki pasar permanen, dan membangun akses jalan menuju pasar;
- 5) memenuhi kebutuhan akan stasiun pemancar atau BTS (Base Tranceiver Station) di wilayah nirsinyal (blankspot), dan memberikan akses kepada daerah untuk tersambung secara online layanan jaringan komunikasi data; dan
- 6) meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat melalui preservasi, rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jalan.

d. Kemampuan Keuangan Daerah

- 1) menguatkan kapasitas dan kelembagaan daerah dalam rangka penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*);
- 2) menguatkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- 3) meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan lain yang sah; dan
- 4) memperbaiki sistem penerimaan pajak dan retribusi.

e. Aksesibilitas

- 1) meningkatkan pelayanan angkutan udara, pembangunan bandar udara, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara;
- 2) membangun dan mengelola prasarana perhubungan darat; dan
- 3) meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut.

f. Kriteria ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

f. Kriteria Karakteristik Daerah

- 1) meningkatkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
- 2) membentuk jaringan komunikasi bencana berbasis masyarakat dan pelatihan tim siaga bencana;
- 3) mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
- 4) penanganan daerah pasca konflik, daerah rawan bencana, dan daerah rawan pangan;
- 5) mengembangkan kerukunan hidup umat beragama melalui dialog lintas agama;
- 6) meningkatkan pengelolaan taman nasional secara berkelanjutan; dan
- 7) melakukan rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan kritis, DAS, dan pengendalian kerusakan perairan darat.

E. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Kalimantan

1. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Kalimantan

Sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Kalimantan pada tahun 2019 adalah:

- a. meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 5,07%;
- b. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 6,30%; dan
- c. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal menjadi 66,67.

2. Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Kalimantan

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Kalimantan difokuskan pada:

- a. pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan;

b. peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik;
 - d. promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah; dan
 - e. pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis sektor unggulan lokal.
3. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Kalimantan
- a. Perekonomian Masyarakat
 - 1) mengembangkan potensi lokal dan menciptakan wirausaha baru untuk mendorong perluasan kesempatan kerja;
 - 2) memberikan dukungan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pertanian;
 - 3) mendorong investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan, pertanian, dan peternakan hingga pemasaran produk;
 - 4) mengembangkan sistem distribusi dan mengontrol stabilitas harga pasar untuk pelaku usaha kecil menengah;
 - 5) meningkatkan hasil produksi pertanian melalui dukungan teknis pengelolaan air irigasi pertanian;
 - 6) mengembangkan tanaman buah dan hortikultura mulai dari pembudidayaan hingga pengolahan dan pemasaran; dan
 - 7) memanfaatkan BUMDES untuk mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan, serta pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.
 - b. Sumber Daya Manusia
 - 1) meningkatkan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pemberian tunjangan;
 - 2) mendistribusikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - 3) meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat;
 - 4) mengembangkan kompetensi kerja dan pelatihan kerja untuk masyarakat daerah tertinggal; dan
 - 5) mengembangkan pelayanan pendidikan khusus melalui pembinaan pendidikan dan layanan khusus.
 - c. Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

c. Sarana dan Prasarana

- 1) mengeksplorasi pelayanan air bersih di daerah sulit air, membangun sistem perpipaan air bersih di wilayah perbatasan, dan membangun sarana penampung air lainnya seperti embung;
- 2) membina dan mengembangkan kawasan permukiman dalam rangka menciptakan permukiman layak huni;
- 3) meningkatkan aksesibilitas masyarakat melalui preservasi, rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jalan;
- 4) meningkatkan perencanaan, pembangunan dan pengawasan infrastruktur energi baru, terbarukan dan konservasi energi salah satunya pembangunan PLTS terpusat off grid di kawasan perbatasan;
- 5) meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi antara lain merevitalisasi pasar rakyat, membangun pasar baru di daerah yang belum memiliki pasar permanen, dan membangun akses jalan menuju pasar; dan
- 6) membangun stasiun pemancar atau BTS (*Base Transceiver Station*) di wilayah nirsinyal (*blankspot*), dan memberikan akses kepada daerah untuk tersambung secara online layanan jaringan komunikasi data.

d. Kemampuan Keuangan Daerah

- 1) pendidikan dan pelatihan kualitas aparatur daerah khususnya terkait pengembangan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat sesuai potensi daerah;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antarsatuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan program pembangunan di daerah;
- 3) pemberian insentif untuk pihak swasta dalam proses pengembangan usaha di kabupaten tertinggal; dan
- 4) memperbaiki sistem penerimaan pajak dan retribusi.

e. Aksesibilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- e. Aksesibilitas
 - 1) meningkatkan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan pengelolaan sarana perhubungan darat, air, dan udara;
 - 2) melengkapi fasilitas pendukung bandar udara; dan
 - 3) mengembangkan fasilitas pelabuhan laut.

- f. Karakteristik Daerah
 - 1) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
 - 2) penanganan daerah pasca konflik, daerah rawan bencana, dan daerah rawan pangan;
 - 3) meningkatkan forum kerukunan umat beragama;
 - 4) mengelola taman nasional secara berkelanjutan;
 - 5) melakukan rehabilitasi hutan serta pengendalian kerusakan perairan darat; dan
 - 6) pengembangan siaga bencana dini melalui pemasangan *early warning system* untuk pendeteksi bencana banjir dan longsor, serta pembangunan tanggul pemecah ombak (*break water*) di kawasan pesisir dengan potensi bencana gelombang besar.

F. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Jawa

1. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Jawa

Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Jawa pada tahun 2019 adalah:

- a. meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 4,72%;
- b. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 13,38%; dan
- c. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal menjadi 64,64.

2. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Jawa

Fokus kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal Wilayah Jawa difokuskan dalam:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pemerataan pendidikan dan kesehatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat yang berkualitas;
- b. peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dasar sebagai konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan; dan
- c. pengembangan potensi lokal pariwisata dan komoditas unggulan untuk kemeningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Strategi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

3. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Jawa
 - a. Perekonomian Masyarakat
 - 1) meningkatkan hasil produksi pertanian melalui pemberian dukungan berupa sarana dan prasarana pendukung pertanian seperti alat pertanian, pupuk, dan sebagainya;
 - 2) memperluas kesempatan kerja melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan menciptakan wirausaha baru;
 - 3) menjaga keberlanjutan usaha hasil pengembangan ekonomi lokal secara terintegrasi;
 - 4) menjaga stabilitas harga pasar dan pengembangan distribusi bagi pengusaha kecil dan menengah;
 - 5) mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan melalui BUMDes; dan
 - 6) mengembangkan potensi pariwisata perdesaan melalui pemberian bantuan pengembangan potensi pariwisata terpadu di kawasan perdesaan.
 - b. Sumber Daya Manusia
 - 1) memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan kepada seluruh elemen masyarakat saah satunya melalui penyediaan layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - 2) mendistribusikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - 3) meningkatkan kompetensi kerja dan pelatihan kerja untuk masyarakat daerah tertinggal; dan
 - 4) meningkatkan kualitas tenaga kependidikan.
 - c. Sarana dan Prasana
 - 1) memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di kabupaten daerah tertinggal wilayah Jawa;
 - 2) membina kawasan permukiman dalam rangka menciptakan permukiman layak huni;
 - 3) menyediakan stasiun pemancar atau *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah nirsinyal (*blankspot*) layanan telekomunikasi, dan penyediaan akses jaringan internet; dan
 - 4) membangun sarana dan prasarana air bersih sehat di seluruh desa, terutama di wilayah sulit air.
 - d. Kemampuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- d. Kemampuan Keuangan Daerah
 - 1) menguatkan kapasitas dan kelembagaan daerah dalam rangka penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - 2) menguatkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
 - 3) meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan lain yang sah; dan
 - 4) memperbaiki sistem penerimaan pajak dan retribusi.

- e. Aksesibilitas
 - 1) Meningkatkan operasional perhubungan darat;
 - 2) membangun dan meningkatkan jalan akses menuju ke sarana perhubungan; dan
 - 3) meningkatkan fasilitas pendukung bandar udara.

- f. Karakteristik Daerah
 - 1) mengembangkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
 - 2) penanganan konflik sosial melalui forum kerukunan umat beragama dan peningkatan peran pranata adat; dan
 - 3) penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan kritis, perencanaan DAS, serta pengendalian kerusakan perairan darat.

G. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera

1. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera

Sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Sumatera pada tahun 2019 adalah:

- a. meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,80%;
- b. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15,30%; dan
- c. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal menjadi 65,20.

2. Arah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

2. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera

Percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Sumatera diarahkan untuk:

- a. peningkatan perekonomian masyarakat melalui promosi dan pengembangan potensi daerah;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar publik bagi seluruh masyarakat;
- c. peningkatan peran serta masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka penguatan kapasitas dan peningkatan daya saing masyarakat; dan
- d. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana sebagai penunjang konektivitas antara daerah tertinggal terhadap perkotaan dan pusat pertumbuhan.

3. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera

a. Perekonomian Masyarakat

- 1) mengembangkan agrowisata dan komoditas unggulan wilayah antara lain komoditas kopi, rempah, kakao, tanaman serealia, dan sebagainya;
- 2) memberikan kepastian pasar kepada pelaku usaha kecil menengah melalui pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan;
- 3) mendorong investasi pengembangan ekonomi lokal secara terintegrasi mulai dari hulu-hilir hingga pemasaran produk;
- 4) meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil dan menengah melalui edukasi ekonomi kreatif;
- 5) mengembangkan dan meningkatkan perluasan kesempatan kerja;
- 6) meningkatkan akses jalan ke pasar, dermaga penangkapan ikan, dan sebagainya;

b. Sumber ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

b. Sumber Daya Manusia

- 1) meningkatkan standardisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja untuk masyarakat daerah tertinggal;
- 2) mendistribusikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
- 3) memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan melalui pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan distribusi guru.

c. Sarana dan Prasarana

- 1) meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di kabupaten daerah tertinggal wilayah Sumatera;
- 2) membina dan mengembangkan kawasan permukiman dalam rangka menciptakan permukiman layak huni;
- 3) mengembangkan infrastruktur energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- 4) membangun sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi melalui penyediaan stasiun pemancar atau *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah nirsinyal (*blankspot*) layanan telekomunikasi, dan penyediaan akses jaringan internet;
- 5) mengembangkan sumber daya air bersih melalui sistem penyediaan air minum (SPAM);
- 6) membangun dan meningkatkan jalan penghubung antar wilayah terutama wilayah terisolir ke pusat-pusat pertumbuhan; dan
- 7) meningkatkan fasilitas pelayanan publik melalui rehabilitasi fasilitas umum.

d. Kemampuan Keuangan Daerah

- 1) harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- 2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi daerah;
- 3) penguatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- 3) penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif; dan
 - 4) memperbaiki sistem penerimaan pajak dan retribusi untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dan potensi penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan lain yang sah.
- e. Aksesibilitas
- 1) meningkatkan fasilitas pelayanan bandar udara;
 - 2) meningkatkan konektivitas laut melalui pembangunan pelabuhan penyeberangan dan fasilitas pelabuhan; dan
 - 3) melakukan pengadaan dan pemasangan fasilitas pelengkap jalan.
- f. Karakteristik Daerah
- 1) memelihara kelestarian alam pesisir melalui penanaman terumbu karang, rehabilitasi hutan mangrove, dan penanaman pohon di sekitar pantai;
 - 2) mengembangkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
 - 3) penanganan daerah pasca konflik, penanganan daerah rawan bencana, dan penanganan daerah rawan pangan;
 - 4) meningkatkan pengelolaan taman nasional secara berkelanjutan; dan
 - 5) penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan kritis, perencanaan DAS, serta pengendalian kerusakan perairan darat.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL

Program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah program dan kegiatan lintas prioritas nasional dan lintas Kementerian/Lembaga yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019.

Program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kementerian/Lembaga Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga	Program	Kegiatan	Output
Badan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Edukasi Ekonomi Kreatif	SDM Ekonomi Kreatif yang didukasi
		Fasilitasi Infrastruktur Fisik	Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Infrastruktur Fisik
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Program Penanggulangan Bencana	Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Rambu Evakuasi, Papan Peringatan Dan Informasi Bencana
			Sistem Peringatan Dini Bencana
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	Desa Tangguh Bencana
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
		Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana	Aparatur Penanggulangan Bencana yang terlatih
Kementerian Agama	Program Bimbingan Masyarakat	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama	Peningkatan Kompetensi Guru
	Program Bimbingan Masyarakat	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama	Dosen yang memperoleh Peningkatan Kompetensi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal	Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal
		Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	Pengembangan Agrowisata
		Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal	Asrama Siswa dan Guru yang Dibangun di Daerah Tertinggal
			Ruang Kelas Baru yang di Bangun di Daerah Tertinggal

Tenaga ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 34 -

Kementerian/Lembaga	Program	Kegiatan	Output
			Tenaga Kerja yang Ditingkatkan Kapasitasnya
			Wirausaha yang meningkat pendapatannya dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah tertinggal
		Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal	Jalan Non Status yang dibangun / ditingkatkan di Daerah Tertinggal
			Pasar Kecamatan yang dibangun dan fungsional mendukung PRUKADES
	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pembangunan Sarana Prasarana Desa	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Destinasi Wisata
			Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air lainnya
		Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	Bumdes yang dikembangkan Untuk Mendukung Produk Unggulan Desa
			Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes
	Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	Kasus tanah transmigrasi yang diselesaikan
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Jalan non status yang dibangun di Kawasan Transmigrasi
			Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi
			Saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi di Kawasan Transmigrasi
			Satuan Permukiman yang sarana dan prasarannya dikembangkan, dan fungsional di kawasan Transmigrasi
		Pengembangan Usaha Transmigrasi	Prasarana dan sarana produksi, pasca panen, dan pengolahan hasil yang dibangun dan berfungsi di KPB
	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	BUM Desa Bersama yang dikembangkan
			Kelompok rumah tangga miskin yang mendapatkan akses modal usaha
			Pasar yang dibangun dan berfungsi
		Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan	Prasarana dan Sarana Pelayanan Dasar Kawasan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan
		Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan	Kawasan Perdesaan yang memiliki Potensi Sumber Daya Alam Unggulan yang dikembangkan dan dikelola dengan pendekatan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
	Program Pengembangan Daerah Tertentu	Penanganan Daerah Pasca Konflik	Masyarakat dan pemerintah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah rawan konflik

Panata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Kementerian/Lembaga	Program	Kegiatan	Output
			Pranata adat yang ditingkatkan perannya dalam penanganan konflik sosial melalui festival budaya dan olahraga
		Penanganan Daerah Rawan Bencana	Early Warning System / EWS Banjir atau Longsor Yang Disediakan Di Daerah Tertinggal Yang Mempunyai Risiko Bencana Tinggi
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Pembangunan Embung dan Bangunan Air lainnya
			Pembangunan Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur
			Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan
		Pengembangan Daerah Perbatasan	Embung yang dibangun di kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal
			Jalan Non Status Perbatasan yang ditingkatkan di daerah tertinggal
			Kabupaten Tertinggal di Perbatasan yang dikembangkan Potensi Sumberdayanya
			Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun di Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal
		Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar	Penyediaan Sarana Air Bersih Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar
			Penyediaan Kapal Barang Untuk Daerah Pulau Kecil dan Terluar
			Penyediaan Kapal Penumpang Untuk Daerah Pulau Kecil dan Terluar
			Potensi Sumber Daya di Daerah Pulau Kecil dan Terluar
	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Satuan Permukiman yang sarana dan prasarananya dibangun, dan fungsional di kawasan Transmigrasi
		Penataan Persebaran Penduduk	Penduduk yang ditata persebarannya dan ditempatkan pada satuan permukiman di Kawasan Transmigrasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Penelitian, Penyelidikan, Perekrayasaan dan Pelayanan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan	Eksplorasi dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat
	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Kawasan 4T
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pemantauan dan Operasi Armada	Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
		Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	Kapal Perikanan yang Laik Operasional

Program ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 36 -

Kementerian/Lembaga	Program	Kegiatan	Output
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	Operasional Pabrik Pakan Mandiri Skala Medium untuk bantuan kepada masyarakat
		Pengelolaan Perbenihan Ikan	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Rote, Kabupaten Rote Ndao yang mandiri
		Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Sumba Timur yang mandiri
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mandiri
		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ditingkatkan fasilitasnya
			Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang ditingkatkan fasilitasnya
			Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Merauke yang Mandiri
		Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Kabupaten Nunukan yang mandiri
	Program Pengelolaan Ruang Laut	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Lahan Garam yang difasilitasi
			Sarana Niaga Garam Rakyat Yang Dibangun
		Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkatkan ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim
			Pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan
			Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Morotai yang mandiri
		Perencanaan Ruang Laut	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri
		Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan
			Keanekaragaman Hayati Laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan
			Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Mentawai Yang Mandiri
	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten Biak Numfor yang mandiri
		Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Prasarana logistik ikan yang dibangun dan dimanfaatkan
			Sarana logistik ikan yang disediakan dan dimanfaatkan
		Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	Sarana dan prasarana pengolahan hasil KP yang dibangun dan dimanfaatkan

Program ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Kementerian/Lembaga	Program	Kegiatan	Output
	Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Riset Kelautan	Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Garam
			Sarana Prasarana Riset Kelautan
Kementerian Kesehatan	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur (Prioritas)
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta di Papua dan Papua Barat
Kementerian Ketenagakerjaan	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
			Wirusaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalattas	Pelaksanaan Sertifikasi
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	Tenaga Kerja yang Mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	Tenaga Kerja yang Mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Banten
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Bengkulu
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Gorontalo
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Jawa Timur
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Kalimantan Barat
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Kalimantan Selatan
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Kalimantan Utara
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Maluku
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Nusa Tenggara Barat
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Nusa Tenggara Timur
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Papua

Tenaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Kementerian/Lembaga	Program	Kegiatan	Output
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Sulawesi Selatan
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Sulawesi Tengah
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Sumatera Barat
			Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Sumatera Selatan
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Pusat Pengembangan Keahlian / Skill Development Center
		Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kelembagaan Binalattas	Upgrading/Pelatihan Instruktur dan Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Penyediaan Infrastruktur dan Ekosistem Telekomunikasi dan Penyiaran	Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro	Pedagang Skala Mikro Informal / Pedagang Kaki Lima yang Difasilitasi Penataan Lokasi, Sarana Usaha dan Promosi
			Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi
			Sarana Pemasaran Di Daerah Tertinggal, Perbatasan Dan Pasca Bencana
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Pengelolaan Taman Nasional	Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro Hidro di sekitar dan di dalam Kawasan Konservasi
			Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat
			Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi
			Sarana Prasarana Ekowisata Taman Nasional Model SBSN
	Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	Pengelolaan B3	Penghapusan Penggunaan Merkuri
		Pengelolaan Sampah	Pengurangan Timbulan Sampah Melalui Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) di Destinasi Wisata
	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan	Penyediaan Benih Berkualitas dan Materi Genetik Unggul
			Tersedianya Bibit Berkualitas
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif
			Tersedianya Bibit Berkualitas

Program ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Kementerian/Lembaga	Program	Kegiatan	Output
	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut	Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan
Kementerian Pariwisata	Program Pengembangan Kepariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata Wilayah Indonesia Timur	Perintisan Destinasi Pariwisata Prioritas
		Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga	Gerakan Sadar Wisata di destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo
			Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Bidang Pariwisata Untuk Menjadi Bagian Dari Rantai Pasok Pariwisata Di Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus
			Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan
		Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan Pos Lintas Batas Negara
		Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Sistem Pengelolaan Air Limbah
	Program Pengembangan Perumahan	Pemberdayaan Perumahan Swadaya	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
		Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial	Pembangunan PSU Rumah Umum
		Penyediaan Rumah Khusus	Pembangunan Rumah Khusus
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
			Pelebaran Jalan Menuju Standar
			Pemeliharaan Rehabilitasi Jalan
			Pemeliharaan Rutin Jalan
			Rekonstruksi Jalan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah Garis Depan (Daerah 3T) Berbasis TIK
		Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara	SDM Berkompeten
	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	Guru Dikdas yang Menerima Tunjangan Khusus
		Pembinaan Guru Pendidikan Menengah	Guru Dikmen yang Menerima Tunjangan Khusus
	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang mendapatkan Peningkatan Sarana

Program ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 40 -

Kementerian/Lembaga	Program	Kegiatan	Output
	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Ruang Penunjang Lainnya Yang Dibangun
			Ruang Perpustakaan Yang Dibangun
			Sekolah Yang Direnovasi
			Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan
			Unit Sekolah Baru Yang Dibangun
		Pembinaan Sekolah Dasar	Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan
		Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Ruang Belajar Yang Direhabilitasi
			Ruang Kelas Baru Yang Dibangun
			Ruang Laboratorium Yang Dibangun
			Ruang Perpustakaan Yang Dibangun
			SD-SMP Satu Atap yang dibangun
			Sekolah Yang Direnovasi
			Sekolah Yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan
			Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar
			Unit Sekolah Baru Yang Dibangun
Kementerian Perhubungan	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat	Layanan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat
		Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat	Layanan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)
			Layanan Pembangunan Terminal (Prioritas Nasional)
			Layanan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat	Layanan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat
		Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan	Layanan Pengelolaan Keselamatan Perhubungan Darat
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Laut Prioritas Nasional
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Layanan Kepelabuhanan
			Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Prioritas Nasional
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pelayanan Angkutan Udara	Penerbangan Perintis Pendukung Program Prioritas Nasional (Konektifitas)
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Kapasitas Bandar Udara Pendukung Prioritas Nasional (Konektifitas)

Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 41 -

Kementerian/Lembaga	Program	Kegiatan	Output
Kementerian Pertanian	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Pengembangan ternak ruminansia perah
	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Benih Jagung
			Benih Kedelai
			Benih Padi
			Diseminasi dan Penyiapan Teknologi Untuk Dimanfaatkan Pengguna
			Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi
			Pengembangan Inovasi Perbenihan dan Perbibitan untuk Pengembangan Benih VUB dan Galur Unggul Baru
			Produksi Benih Bawang Merah
			Produksi Benih Buah Tropika dan Sub Tropika
			Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung Swasembada Pangan terintegrasi Desa Mandiri Benih
	Program Pendidikan Pertanian	Pendidikan Pertanian	Kelembagaan Politeknik yang difasilitasi dan dikembangkan
			Sarana dan prasarana Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan)
			Siswa yang mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Kawasan Mandiri Pangan
		Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pengembangan Pangan Lokal
		Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina
			Lumbung Pangan Masyarakat
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian
			Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani
			Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah
			Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya
		Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan

Kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 42 -

Kementerian/Lembaga	Program	Kegiatan	Output
			Kawasan Jeruk
		Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Kawasan Aneka Cabai
			Kawasan Bawang Merah
	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan
			Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan
		Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
		Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Pengembangan Tanaman Rempah
			Pengembangan Tanaman Tebu
		Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Pengembangan Tanaman Kakao
			Pengembangan Tanaman Karet
			Pengembangan Tanaman Kelapa
			Pengembangan Tanaman Kopi
			Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Papua dan Papua Barat
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai
			Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar Untuk Papua dan Papua Barat
		Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Fasilitas Budidaya Padi untuk Merauke
			Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung
			Fasilitas Penerapan Budidaya Padi
			Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Organik
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
			Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani
		Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Irigasi Perpompaan dan Perpipaan
			Jaringan Irigasi Tersier
			Pembangunan Embung Pertanian
		Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Cetak Sawah
Kementerian Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan Tahun I

A. Program ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

A. Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Di Wilayah Papua.

Secara umum penyebab ketertinggalan di Wilayah Papua adalah Perekonomian Masyarakat, Aksesibilitas, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Kemampuan Keuangan Daerah, dan Karakteristik Daerah. Intervensi kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dibiayai melalui APBN lintas Kementerian/Lembaga di wilayah Papua antara lain dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Tabel 9

Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Cetak Sawah	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	194.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	-	HA	Kementerian Pertanian	-
		Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di PPK	5.00	komunitas	Kementerian KKP	-
		Pengembangan Agrowisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	2.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Sumber ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan	
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	52.00	Siswa	Kementerian Agama	-	
		Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-	
		Gedung dan Bangunan	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-	
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-	
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	250.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-	
		Lembaga Keagamaan yang Difasilitasi	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-	
		Penyuluh Agama	5.00	Orang	Kementerian Agama	-	
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	2.00	Orang	Kementerian Agama	-	
		Siswa MI penerima BOS	225.00	Siswa	Kementerian Agama	-	
		Siswa MTs penerima BOS	35.00	Siswa	Kementerian Agama	-	
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	23.00	Orang	Kementerian Agama	-	
		Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
			Aksesibilitas	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhanan	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan

Karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Rehabilitasi Hutan mangrove	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
TELUK BINTUNI	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	5.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	177.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	25.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	3.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMK	3.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	51.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Rehabilitasi Fasilitas Darat Pelabuhan Tual	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rambu Evakuasi, Papan Peringatan Dan Informasi Bencana
		Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Sistem Peringatan Dini Bencana
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan

Sorong ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
Sorong Selatan	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	177.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	1.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	34.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Gedung dan Bangunan	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Keluarga Sakinah yang Terbina	12.00	Pasangan	Kementerian Agama	-

Kitab ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	250.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	4.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Siswa MI penerima BOS	112.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	53.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	25.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tual (Dermaga Beton 12 x 73 M2 dan Trestel Beton 8 x 53 M2 + Pelebaran)	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Rehabilitasi dan Perbaikan Fasilitas Dermaga dan Trestel Pelabuhan Tual	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Moa TA. 2019	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-

Operasional ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
SORONG	Perekonomian Masyarakat	Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Cetak Sawah	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	830.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Irigasi Perpompaaan dan Perpipaan	5.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan

Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Produk Unggulan Daerah Tertinggal Berbasis Inovasi Teknologi Bidang Produksi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Ekonomi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan pasar kecamatan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Rumah Susun MBR	42.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial	140.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1,100.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	5.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMA	4.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	13.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	9.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	24.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	49.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	63.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahtherimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
		Revitalisasi PLT EBT	1.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	FASPEL laut Tapa	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Faspel Molu Maru	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pembangunan Faspel Laut Wonreli TA. 2019	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Rehab Faspel Geser	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-

Rehab ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Rehab Faspel Gorom	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Rehab Faspel Kesui	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Letty TA. 2019	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif Tersedianya Bibit Berkualitas
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
Raja Ampat	Perekonomian Masyarakat	Cetak Sawah	50.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	177.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	-	UNIT	Kementerian Pertanian	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	1.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Sudah dialokasikan pada tahun 2018
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	95.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.00	UNIT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Embung di Prov. Papua Barat (Embung Sekru dan Embung Sungai 300)	2.00	buah	Kementerian PUPR	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan SPAL Raja Ampat	1,000.00	KK	Kementerian PUPR	-
		Pengembangan Permukiman Perdesaan Prioritas Nasional di Kab. Raja Ampat Pengembangan Permukiman Perdesaan Prioritas Nasional di Kab. Raja Ampat	11.25	HA	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	3.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	4.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMP	55.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Namrole	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
Tambrau	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	93.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	2.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	150.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	5.00	Orang	Kementerian Agama	-

Penyuluh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	7.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMA	4.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	46.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Revitalisasi PLT EBT	1.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Maybrat	Perekonomian Masyarakat	Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	607.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	5.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-

Sumber ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sumber Daya Manusia	Dukungan Layanan Pendidikan	1.00	Layanan	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	3.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Jalan Non Status di Daerah Tertinggal dalam Rangka mendukung Prukades	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penataan Bangunan Kws. Gereja Mapura	10,000.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	650.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMA	1.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	40.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Moa	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Saumlaki	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Hila (Romang)	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-

Karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Merauke	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Cetak Sawah	800.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	894.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	10,880.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	1.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penumbuhan Wirausahawan di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Lembaga Ekonomi masyarakat transmigrasi di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Pasca panen di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengolahan hasil dan pemasaran di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	6.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Revitalisasi sarana dan prasarana produksi di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	Bantuan Sekolah Minggu/Pasraman	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kelembagaan sosial budaya di kawasan transmigrasi yang berfungsi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pencegahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1.00	Paket	Kementerian Kesehatan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta di Papua dan Papua Barat
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan PLBN Terpadu Sota	10,380.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan DIR Tanah Miring Kab. Merauke	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.00	UNIT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku SA Sungai Maro Kota Merauke; Kabupaten Merauke	2.40	km	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Jalan Kawasan	2.80	km	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan PSU Rumah Umum	120.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Prioritas Nasional Merauke	31.00	HA	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Rehabilitasi DIR Kurik Kab. Merauke	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Rehabilitasi DIR Sermayam-Erom Kab. Merauke	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMA	30.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	26.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	89.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	6.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Buli - Maba	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Bandar Udara Dobo	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Gamarmalamo - Galela	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Kufar	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Namniwel	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Oesman Sadik - Labuha	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Sanana	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Rehabilitasi Terminal Manggadua	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Solar Cell untuk program 1000 desa Halmahera Selatan	25.00	UNIT	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana

Pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi
		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan
	Penunjang	Pengurusan sertifikat tanah transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Ukur Bagi Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	1,687.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-

Jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Jaringan Irigasi Tersier	250.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Papua dan Papua Barat	170.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Bantuan Sekolah Minggu/Pasraman	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Gedung dan Bangunan	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	2.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Penguatan KKG/MGMP	1.00	kelompok	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	4.00	Orang	Kementerian Agama	-

Penyuluh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	11.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tenaga Penyuluh Yang Dibina	2.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	8.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Non PNS	3.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kawasan Kumuh Tolikara di Kota Wamena	9.75	HA	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMK	15.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMP	73.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Ruas Jalan 31, Sorong - Makbon	323.00	UNIT	Kementerian Perhubungan	-
		Ruas Jalan 32, Makbon - Mega	642.00	UNIT	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kab/Kota	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Nabire	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	1,687.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Karet	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Tanaman Kelapa	150.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	5.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Diusulkan melalui proposal yang ditujukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM; - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran K/L.
	Sumber Daya Manusia	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	2.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Lembaga Keagamaan yang Difasilitasi	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-

Lembaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	2.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Lembaga Pendidikan Keagamaan yang memperoleh bantuan operasional	2.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS yang mendapatkan tunjangan	4.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Peserta Didik yang mendapatkan Pembinaan Karakter	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan yang mendapatkan Intensif	2.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	12.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Wersimar	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pembangunan Rumah Operasional (9 unit)	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-

Rehabilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Rehabilitasi Gedung Kantor KSOP Kelas II Ternate	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Ruas Jalan 05, Kambuaya - Susumuk	334.00	UNIT	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kab/Kota	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rambu Evakuasi, Papan Peringatan Dan Informasi Bencana
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Kepulauan Yapen	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan bioflok	200.00	Paket	Kementerian KKP	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Dukungan Layanan Pendidikan	1.00	Layanan	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	15.00	Orang	Kementerian Agama	-

Lembaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	2.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Lembaga Pendidikan Keagamaan yang memperoleh bantuan operasional	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan yang mendapatkan Intensif	1.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	8.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Fasilitasi Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMA	10.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	8.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	73.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kab/Kota	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-

Kesiapsiagaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Sistem Peringatan Dini Bencana
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
BIAK NUMFOR	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	-	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Bantuan Sekolah Minggu/Pasraman	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-

Guru ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1.00	Paket	Kementerian Kesehatan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta di Papua dan Papua Barat
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Papua
	Sarana Dan Prasarana	Fasilitasi Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Jalan Non Status di Daerah Tertinggal dalam Rangka mendukung Prukades	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	34.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMK	15.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	59.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Laiwui	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Renovasi Terminal Penumpang Pelabuhan Wayaloar	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif
Paniai	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-

Bantuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SD	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	31.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	19.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	73.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Tanah Operasional (50 x 50) m2	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
PUNCAK JAYA	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	3.00	Orang	Kementerian Agama	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sarana Dan Prasarana	Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	4.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	63.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Wasior	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Internalisasi Konflik Sensitif Planning and Budgeting	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Peningkatan Kohesi Sosial Dalam Pencegahan Konflik	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Penyiapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
Boven Digoel	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Karet	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	1.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	9.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	12.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	8.00	Orang	Kementerian Agama	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan PLBN Yetetkun	8,000.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Museum Bung Hatta Boven Digoel	2,500.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Penataan Bangunan Kws. Penjara Bung Hatta Boven Digoel	12,000.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Aksesibilitas	Pelayanan Angkutan Udara Perintis (Subsidi Angud Perintis)	6.00	RUTE	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Babo	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Bintuni	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Inanwatan	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Teminabuan	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Mappi	Perekonomian Masyarakat	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	475.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	10.00	Orang	Kementerian Agama	-

Guru ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	12.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	8.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Asrama Siswa dan Guru	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan DIR Mur Linggua Kab. Mappi	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Sarana dan Prasarana SD	1.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	25.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	3.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMP	56.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara DEO Sorong	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Segun	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kab/Kota	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Asmat	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	1.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Lembaga Keagamaan yang Difasilitasi	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	15.00	Orang	Kementerian Agama	-

Perangkat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	8.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Reservoir Air Baku Kab. Asmat	4.00	buah	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Kab.Asmat	3.00	Titik	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMA	7.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	62.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Daerah Tertinggal	4.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Kambuaya	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Marinda - Raja Ampat	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan
Yahukimo	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-

Penyuluh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	4.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	6.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMA	6.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	55.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Aksesibilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Aksesibilitas	Pelayanan Angkutan Udara Perintis di Bandara Wamena (11 rute perintis penumpang, 4 rute perintis kargo, subsidi BBM 800 drum untuk perintis penumpang dan 850 drum untuk perintis kargo)	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Ayawasi	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Sobaham	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Wamena	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Werur	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Ruas Jalan 31, Km 40 - Bts. Kota Merauke	26.00	UNIT	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Pegunungan Bintang	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Papua dan Papua Barat	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Sumber ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sumber Daya Manusia	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	2.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyediaan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	1.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	4.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	3.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	89.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pekerjaan Bangunan Operasional Pegawai Kantor KSOP Merauke TA.2019	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pelayanan Angkutan Udara Perintis	12.00	RUTE	Kementerian Perhubungan	-
		Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut, Single Pipe 4 Kaki Cahaya Merah dan Hijau di Sungai Maro Merauke	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Moanamani	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Nabire	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Soedjarwo Tjondronegoro - Serui	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-

Ruas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Ruas Jalan 31, Km 40 - Bts. Kota Merauke	12.00	UNIT	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Tolikara	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	8.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	3.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	500.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SMA	3.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	30.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Pagar Pengaman SROP Agats	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengolah Air Minum untuk SROP Agats	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Bokondini	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Enarotali	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Karubaga	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Numfor	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
SARMI	Perekonomian Masyarakat	Lambung Pangan Masyarakat	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-

Pemberdayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	5.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	5.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
	Sumber Daya Manusia	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	16.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Pagar Beton Pelabuhan Wayaloar	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-

Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengadaan Peralatan Survey Multibeam Shallow Water	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Mulia	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Renovasi Gedung Kantor	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Sistem Peringatan Dini Bencana
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
Keerom	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Cetak Sawah	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	475.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Papua dan Papua Barat	270.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Alat Pengolahan Pasca Panen Produk Unggulan Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	2.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan; 2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi; 3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.

Sumber ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sumber Daya Manusia	Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Gedung dan Bangunan	2.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional	10.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	26.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	2.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kelembagaan sosial budaya di kawasan transmigrasi yang berfungsi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Keluarga Sakinah yang Terbina	12.00	Pasangan	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	2.00	UNIT	Kementerian Agama	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Papua
		Penguatan KKG/MGMP	1.00	kelompok	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Siswa MI penerima BOS	340.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	16.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Nabire	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Bomakia	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Senggeh	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Peningkatan Fasilitas Umum	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kab/Kota	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-

Operasional ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Waropen	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Gedung dan Bangunan	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	1.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	1.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	4.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	8.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyediaan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMA	5.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	41.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Morotai	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
SUPIORI	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	25.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-

Lembaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	2.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	2.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Jalan Non Status di Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Sarana dan Prasarana SMA	12.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	1.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	40.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
MAMBERAMO RAYA	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Dukungan Layanan Pendidikan	1.00	Layanan	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	5.00	Orang	Kementerian Agama	-

Guru ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	1.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4.00	UNIT	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Sarana dan Prasarana SMP	49.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Dabra	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Mindiptanah	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Wilker Teba	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
NDUGA	Sumber Daya Manusia	Dukungan Layanan Pendidikan	1.00	Layanan	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-

Kitab ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	4.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4.00	UNIT	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SMA	1.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	55.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pelayanan Angkutan Udara Perintis di Bandara Mopah - Merauke	15.00	RUTE	Kementerian Perhubungan	-
		Pembangunan Rumah Dinas tipe 36	11.00	UNIT	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Akimuga	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Bade	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Bandar Udara Kenyam	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Kepi	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
LANNY JAYA	Perekonomian Masyarakat	Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	Dukungan Layanan Pendidikan	1.00	Layanan	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4.00	UNIT	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Sarana dan Prasarana SMA	14.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	80.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Koroway Batu	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Tiom	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Penyelesaian Trestle dan Dermaga Pelabuhan Sarmi	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
MAMBERAMO TENGAH	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	Dukungan Layanan Pendidikan	1.00	Layanan	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	2.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4.00	UNIT	Kementerian Agama	-

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sarana Dan Prasarana	Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SMP	48.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
YALIMO	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	Dukungan Layanan Pendidikan	1.00	Layanan	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-

Penyuluh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	2.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4.00	UNIT	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SMA	5.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	65.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Revitalisasi PLT EBT	1.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pelayanan Angkutan Udara Perintis (22 rute angkutan perintis penumpang, 18 rute perintis kargo, subsidi BBM 1900 drum, subsidi BBM kargo 1373 drum)	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Bandar Udara Elelim	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Okaba	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
PUNCAK	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	4.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4.00	UNIT	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SMA	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	87.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Ewer	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Ilaga	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Kimam	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Mopah	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Sinak	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
DOGIYAI	Perekonomian Masyarakat	Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	1.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Sumber ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sumber Daya Manusia	Dukungan Layanan Pendidikan	1.00	Layanan	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	6.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4.00	UNIT	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	7.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMK	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	64.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
INTAN JAYA	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Dukungan Layanan Pendidikan	1.00	Layanan	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	4.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4.00	UNIT	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SMP	56.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Bilorai/ Obano	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Renovasi Rumah Negara	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
DEIYAI	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Diusulkan melalui proposal yang ditujukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM; - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran K/L.
	Sumber Daya Manusia	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	10.00	Orang	Kementerian Agama	-

Guru ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kitab Suci dan Buku Keagamaan lainnya	88.00	Eksemplar	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Lembaga Keagamaan yang Difasilitasi	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	1.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SMA	3.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	7.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMP	38.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

B. Program ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

B. Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Di Wilayah Maluku.

Secara umum penyebab ketertinggalan di Wilayah Maluku adalah Aksesibilitas, Karakteristik Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah, Sarana dan Prasarana, Perekonomian Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Intervensi kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dibiayai melalui APBN lintas Kementerian/Lembaga di Wilayah Maluku antara lain dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Tabel 10

Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
Maluku Tenggara Barat	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pembangunan Tambak Garam	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Kebun bibit rumput laut kultur jaringan	80.00	Paket	Kementerian KKP	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Tanaman Kelapa	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Alat Pengolahan Pasca Panen Produk Unggulan Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	5.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Revitalisasi Pasar Rakyat	1.00	Paket	Kementerian Perdagangan	- Dalam tahap penilaian usulan - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Diusulkan melalui proposal yang ditujukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM; - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran K/L.
		SKPT Saumlaki: Pembagunan Sarana PP Ukularan	1.00	Paket	Kementerian KKP	-
	Sumber Daya Manusia	Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Asrama Siswa dan Guru	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Jalan Non Status di Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMA	36.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	12.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	39.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Revitalisasi PLT EBT	1.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Lanjutan Pembangunan kapal penyeberangan penumpang Ro-Ro 600 GT untuk Parigi Moutong - Wakai - Marisa (Termasuk Supervisi)	1.00	UNIT	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Data Dawai	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Pangsuma - Putussibau	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-

Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Peningkatan Faspel Sikeli Kabupaten Bombana	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Rehabilitasi Terminal Penumpang 200 m2	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
Maluku Tengah	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Pangan Lokal	1.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Masyarakat Miskin	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan	2.00	KT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	5,071.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	2,500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penumbuhan Wirausahawan di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Fasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Agrowisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Lembaga Ekonomi masyarakat transmigrasi di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Pasca panen di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	2,250.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Pengolahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengolahan hasil dan pemasaran di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	15.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	4.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan; 2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi; 3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
		Revitalisasi Pasar Rakyat	1.00	Paket	Kementerian Perdagangan	- Dalam tahap penilaian usulan - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Sudah dialokasikan pada tahun 2016.
		Revitalisasi sarana dan prasarana produksi di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	100.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMA	129.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Fasilitasi Penyediaan Kapal Penumpang di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	1.00	UNIT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Pemb Pelabuhan Laut Wanci	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
Buru	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	5.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-

Fasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	750.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Produk Unggulan Daerah Tertinggal Berbasis Inovasi Teknologi Bidang Produksi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	-	HA	Kementerian Pertanian	-
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Sudah dialokasikan pada tahun 2016 dan 2018.
	Sumber Daya Manusia	Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan IPLT Kab. Buru (PN3)	4,000.00	KK	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Bendungan Way Apu	1.00	bendungan	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan DI Way Apu Sistem Kab. Buru	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	400.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Rehabilitasi D.I Meten Geren Kab.Buru	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SD	12.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	22.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	28.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	33.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	1.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Rehab berat kantor	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Internalisasi Konflik Sensitif Planning and Budgeting	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana
		Pengembangan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Peningkatan Kohesi Sosial Dalam Pencegahan Konflik	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Bibit Berkualitas
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
KEPULAUAN ARU	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Agrowisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan

Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Produk Unggulan Daerah Tertinggal Berbasis Inovasi Teknologi Bidang Produksi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Maluku
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	24.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Jalan Non Status di Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMA	14.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	8.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	33.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Rehab terminal penumpang	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-

Karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Karakteristik Daerah	Dialog Kerukunan Intern Umat	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
		Rehabilitasi Hutan mangrove	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
SERAM BAGIAN BARAT	Perekonomian Masyarakat	Lambung Pangan Masyarakat	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	2.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan	-	KT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	1,778.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	145.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	1,000.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Produk Unggulan Daerah Tertinggal Berbasis Inovasi Teknologi Bidang Produksi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Ekonomi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	5.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	100.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	22.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMA	101.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	11.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	46.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Pagar Rumah Dinas dan penataan lahan	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pembuatan Bak sampah di seluruh Wilker Di Ampana	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Rumah Operasional Pelabuhan Matangisi	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyediaan Benih Berkualitas dan Materi Genetik Unggul
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif Tersedianya Bibit Berkualitas

Pranata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Rehabilitasi Hutan mangrove	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Seram Bagian timur	Perekonomian Masyarakat	Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pasca Panen Hasil Produksi Pertanian di Kawasan Perdesaan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	5,071.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-

Jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Jaringan Irigasi Tersier	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	1,616.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Ekonomi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen Sungai Matakabo	3.00	buah	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan DI Bubi	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.00	UNIT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Prioritas Nasional Bula	21.00	HA	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Rehabilitasi DI Matakabo	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMA	51.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	5.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	40.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Morowali	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Bandar Udara Sultan Bantilan - Toli-toli	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminuddin - Luwuk	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Maluku Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	10.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	1,766.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	3,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-

Fasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya/Produksi Rumput Laut	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Diusulkan melalui proposal yang ditujukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM; - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran K/L.
		SKPT Maluku Barat Daya (Moa) 1. Operasional SKPT 2. Kapal 3 GT12 unit 3. Refrigerator container 4 ton 1 pkt	1.00	Lokasi	Kementerian KKP	-
	Sumber Daya Manusia	Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	50.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Keluarga yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	5.00	Orang	Kementerian Agama	-

Penyuluh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	3.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SMA	19.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	35.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Pembangunan PLTS Pos Pengamat Gunung Api	1.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional di Kabupaten Nunukan (termasuk supervisi)	1.00	pkt	Kementerian Perhubungan	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Bandar Udara Kuala Pembuang	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Nunukan	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Susilo - Sintang	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Tanjung Api Ampana	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Kerukunan Intern Umat	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
Buru Selatan	Perekonomian Masyarakat	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	1,778.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	8.00	Guru	Kementerian Agama	-

Guru ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	1.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS				
		Siswa MI penerima BOS	311.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	439.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Jalan Non Status di Daerah Tertinggal dalam rangka mendukung Sarana dan Prasarana / Aksesibilitas	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	400.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	22.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMP	33.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	1.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Musola ukuran 9x9	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Nangapinoh	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Pogugol - Buol	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Rumah Type C untuk Pimpinan tipe 80	1.00	UNIT	Kementerian Perhubungan	-
		Rumah Type E untuk Pegawai tipe 36	2.00	UNIT	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Kerukunan Intern Umat	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Kerukunan Hidup Umat Beragama	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
Halmahera Barat	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan minapadi	400.00	Paket	Kementerian KKP	-

Cetak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Cetak Sawah	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Edukasi Ekonomi Kreatif	1.00	Paket	Badan Ekonomi Kreatif	SDM Ekonomi Kreatif yang diedukasi
		Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan	2.00	KT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	32,255.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	400.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	2.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	50.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pedagang skala mikro informal/pedagang kaki lima yang difasilitasi penataan lokasi sarana usaha dan promosi.	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	1,400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	15.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Petugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan; 2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi; 3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
		Revitalisasi Pasar Rakyat	1.00	Paket	Kementerian Perdagangan	- Dalam tahap penilaian usulan - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Sudah dialokasikan pada tahun 2018
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	200.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Gedung dan Bangunan	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	67.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	23.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Pendidikan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Penyuluh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyuluh Agama	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	500.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	36.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	8.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	32.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kab/Kota	2.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rambu Evakuasi, Papan Peringatan Dan Informasi Bencana
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Bibit Berkualitas
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Kepulauan Sula	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	5.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Cetak Sawah	150.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	12,910.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	200.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	150.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Tanaman Kelapa	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	695.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Gedung dan Bangunan	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Kelembagaan sosial budaya di kawasan transmigrasi yang berfungsi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyuluh Agama	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS				
		Siswa MI penerima BOS	1,372.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	215.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	707.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	400.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMA	28.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	5.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	36.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Revitalisasi PLT EBT	1.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
Halmahera Selatan	Perekonomian Masyarakat	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	9,679.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,750.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Tanaman Rempah	1,400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	20.00	Orang	Kementerian Agama	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Asrama Siswa dan Guru	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Jalan Non Status di Daerah Tertinggal dalam rangka mendukung Sarana dan Prasarana / Aksesibilitas	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kawasan Tomori, Kab. Halmahera Selatan	7.30	HA	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	400.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	6.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	79.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	6.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMP	49.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	LANJUTAN PEMB. FASILITAS PELABUHAN LAUT	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pembangunan Bandara Pohnuato (Review Master Plan)	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Moa Tahap II + Supervisi (Selesai)	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Djalaluddin - Gorontalo	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Tampa Padang - Mamuju	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Rehab faspel bumbulan	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Ruas 041 11 k - 041 13 k - 041 15 k Jalan Dalam Kota Saumlaki	4.00	UNIT	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Penyiapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
Halmahera Timur	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pasca Panen Hasil Produksi Pertanian di Kawasan Perdesaan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Cetak Sawah	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	16,132.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	2,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	1.00	Unit	Kementerian Pertanian	-

Fasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	900.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Produk Unggulan Daerah Tertinggal Berbasis Inovasi Teknologi Bidang Produksi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Ekonomi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	-	HA	Kementerian Pertanian	-
		Revitalisasi Pasar Rakyat	1.00	Paket	Kementerian Perdagangan	- Dalam tahap penilaian usulan - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Sudah dialokasikan pada tahun 2018
	Sumber Daya Manusia	Fasilitasi Layanan Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kelembagaan sosial budaya di kawasan transmigrasi yang berfungsi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Pemberdayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
Pulau Morotai	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pasca Panen Hasil Produksi Pertanian di Kawasan Perdesaan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Dermaga Apung	10.00	Lokasi	Kementerian KKP	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	32,255.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-

Fasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	600.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Ekonomi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	17.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Revitalisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Revitalisasi Pasar Rakyat	1.00	Paket	Kementerian Perdagangan	- Usulan belum dinilai, memerlukan konfirmasi lebih lanjut - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran
		SKPT Morotai 1. Tambat lauh 2. Coolbox 1000 L100 unit	1.00	Paket	Kementerian KKP	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	200.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	23.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Penataan KSPN Pulau Morotai Kws. Wisata Army Dock	10,000.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	400.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
PULAU TALIABU	Perekonomian Masyarakat	Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Tanaman Rempah	1	Paket	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	200.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional	916.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	49.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	15.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Kelompok Kategorial	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	33.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS	1.000	Siswa	Kementerian Agama	
		Siswa MI penerima BOS	1,372.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	1,000.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	33.00	Orang	Kementerian Agama	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Palapa Ring)	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	23.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan

C. Program ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

C. Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Di Wilayah Nusa Tenggara.

Secara umum penyebab keteringgalan di Wilayah Nusa Tenggara adalah Sumber Daya Manusia, Perekonomian Masyarakat, Kemampuan Keuangan Daerah, Sarana dan Prasarana, Karakteristik Daerah, dan Aksesibilitas. Intervensi kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dibiayai melalui APBN lintas Kementerian/Lembaga di Wilayah Nusa Tenggara antara lain dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

Tabel 11

Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
Lombok Barat	Perekonomian Masyarakat	Kawasan Mandiri Pangan	1.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Lumbung Pangan Masyarakat	10.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Destinasi Wisata	2.00	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	2,117.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	1,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	3,725.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan/Produksi Hasil Pertanian dan Perkebunan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Irigasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Irigasi Perpompaan dan Perpipaan	5.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
						1. Honor PPKL selama 12 bulan; 2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi; 3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
			4.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-

Revitalisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Sudah dialokasikan pada tahun 2018
	Sarana Dan Prasarana	Penataan Bangunan Bike Park Kws. Senggigi Kec. Batu Layar	30,000.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.00	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Bendungan Meninting	1.00	bendungan	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan PSU Rumah Umum	180.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Rumah Susun Lembaga Pendidikan Berasrama	37.00	UNIT	Kementerian PUPR	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pengeboran Sumur Air Tanah untuk Air Baku Pada Daerah Kekeringan di Provinsi NTB	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Rehabilitasi JIAT serta Prasarana Pendukung Lainnya Tersebar di Pulau Lombok	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	35.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	26.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	44.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	48.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Eksplorasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	3.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pengelolaan B3	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penghapusan Penggunaan Merkuri
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
LOMBOK TENGAH	Perekonomian Masyarakat	Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	8,013.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	17,500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	5,150.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	2.00	Unit	Kementerian Pertanian	-

Fasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	5.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	3.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Nusa Tenggara Barat
	Sarana Dan Prasarana	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.00	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.00	UNIT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Kawasan Pariwisata di KEK Mandalika Bidang PPLP	12.50	HA	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Rumah Susun Lembaga Pendidikan Berasrama	37.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penataan KSPN Mandalika	10,000.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	700.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	89.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	100.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	32.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	59.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Eksplorasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Ekplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
		Revitalisasi PLT EBT	1.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Lanjutan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pengelolaan Sampah	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengurangan Timbulan Sampah Melalui Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) di Destinasi Wisata
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
LOMBOK TIMUR	Perekonomian Masyarakat	Kawasan Mandiri Pangan	1.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Lumbung Pangan Masyarakat	21.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan	1.00	KT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	6,782.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	3,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	10,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	12.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	1.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Irigasi Perpompaan dan Perpipaan	5.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	800.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Kawasan Aneka Cabai	150.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Kawasan Bawang Merah	39.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	2.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-

Petugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan; 2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi; 3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	4.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	5.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Diusulkan melalui proposal yang ditujukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM; - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran K/L.
	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Nusa Tenggara Barat
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Pusat Pengembangan Keahlian / Skill Development Center
		Peningkatan Kapasitas Tenaga kerja Bidang Kesehatan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sarana Dan Prasarana	Fasilitas Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Jalan Non Status Yang dibangun / ditingkatkan di Daerah Tertinggal dalam rangka mendukung Sumber Daya Manusia	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.00	UNIT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan JIAT dan Fasilitas Lainnya di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	54.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	126.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	61.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	66.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Eksplorasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	4.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif Tersedianya Bibit Berkualitas
	Penunjang	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Pelaksanaan Sertifikasi
Sumbawa	Perekonomian Masyarakat	Lambung Pangan Masyarakat	14.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Alat Penangkap Ikan (API)	3,500.00	UNIT	Kementerian KKP	-
		Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	5.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Bundes ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Bundes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Cetak Sawah	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	49,262.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	5,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	19,500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	2.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	1.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	800.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan sarana produksi pertanian di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan ternak ruminansia perah	15.00	ekor	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	70.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Nusa Tenggara Barat
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Bendungan Beringinsila	1.00	bendungan	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.00	UNIT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak di Kabupaten Sumbawa	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Sumur Eksplorasi/Produksi di kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Sumur Eksplorasi/Produksi di kabupaten Sumbawa	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Penataan Kws. Wisata Labupade	50,000.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	500.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	34.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	39.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	52.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMP	57.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Sultan M. Kaharuddin - Sumbawa	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Subsidi operasional Trayek Mataram - Sumbawa - Ropang	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Dompu	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	10.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan benih dan calon induk untuk masyarakat	215000000	ekor	Kementerian KKP	-
		Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pasca Panen Hasil Produksi Pertanian di Kawasan Perdesaan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan	-	KT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	47,810.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	20,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	9,775.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	3.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Irigasi Perpompaan dan Perpipaian	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Kopi	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Tebu	1,800.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Bendung Pengalih dan Saluran Interbasin Bendungan Tanju dan Bendungan Mila	1.00	bendungan	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan DI. Rababaka Kompleks	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.00	UNIT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Sumur Eksplorasi/Produksi di kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pengembangan Permukiman Perdesaan Prioritas Nasional di Manggaladewa	18.00	HA	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	400.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	38.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	52.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	33.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMP	48.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Rehab Faspel	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Bibit Berkualitas
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan

Pranata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Bima	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	10.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Cetak Sawah	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	50,811.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	20,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	6,800.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	12.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penumbuhan Wirausahawan di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Irigasi Perpompaan dan Perpipaian	13.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-

Jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Jaringan Irigasi Tersier	700.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan sarana produksi pertanian di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Pasca panen di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Tebu	2,000.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Revitalisasi sarana dan prasarana produksi di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	Fasilitasi Layanan Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitasi Layanan Sosial di Kawasan Perkotaan Baru	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Kelembagaan sosial budaya di kawasan transmigrasi yang berfungsi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Nusa Tenggara Barat
		Peningkatan Fasilitas Umum	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Rumah Susun MBR	58.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kab. Bima	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	500.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SD	85.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	119.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	25.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	44.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	35.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	63.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Sumbawa Barat	Perekonomian Masyarakat	Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	10,155.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	2,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	10,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	1.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	1.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Irigasi Perpompaan dan Perpipaan	6.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	8.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	33.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Internalisasi Kurikulum Bina Damai Dalam Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Nusa Tenggara Barat
		Siswa MA penerima BOS	596	Siswa	Kementerian Agama	
		Siswa MI penerima BOS	1,061.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	620.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	679.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Bendungan Bintangbano	1.00	bendungan	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan DI. Bintang Bano	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan IPAL Kawasan Kecamatan Seteluk	700.00	KK	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Rumah Khusus Daerah Tertinggal	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kawasan Kuang	7.23	HA	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	700.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	15.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMA	6.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	15.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	37.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	3.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Peningkatan Kohesi Sosial Dalam Pencegahan Konflik	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Penunjang	Ukur Bagi Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
LOMBOK UTARA	Perekonomian Masyarakat	Kawasan Mandiri Pangan	1.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina	2.00	Gapoktan	Kementerian Pertanian	-
		Lumbung Pangan Masyarakat	4.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	3,137.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	1.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	700.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	20.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Nusa Tenggara Barat
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	20.00	Santri	Kementerian Agama	-

Siswa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Siswa MA penerima BOS				
		Siswa MI penerima BOS	3,193.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	3,898.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Rumah Khusus Daerah Tertinggal	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	25.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	13.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	24.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	49.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
		Revitalisasi PLT EBT	1.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-

Karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Karakteristik Daerah	Desa Sadar Kerukunan	2.00	Desa	Kementerian Agama	-
		Dialog Lintas Agama di Kecamatan	2.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Aparatur Penanggulangan Bencana yang terlatih
Sumba Barat	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Pangan Lokal	1.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	2,643.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	2,720.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU	1.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Produk Unggulan Daerah Tertinggal Berbasis Inovasi Teknologi Bidang Produksi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Ekonomi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	56.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Jalan Non Status di Daerah Tertinggal dalam Rangka mendukung Prukades	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan pasar kecamatan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Tanah untuk Air Bakudi Pulau Flores Bagian Barat	5.00	Titik	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	12.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	24.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	16.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMP	37.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi
Sumba Timur	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	10.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	7.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	3,151.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	6,100.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-

Jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Jaringan Irigasi Tersier	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Catu pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	5.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		SKPT Sumba Timur 1. Bansarpras kebun bibit rumput laut 134 pkt 2. Bansarpras Budidaya rumput laut 140 pkt 3. Bantuan perahu rumput laut 50 pkt 4. Bantuan para-para 100 pkt 5. Bantuan budidaya air tawar 6 pkt	1.00	Paket	Kementerian KKP	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	200.00	Siswa	Kementerian Agama	-

Fasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Layanan Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kelembagaan sosial budaya di kawasan transmigrasi yang berfungsi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Kadaha	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Tanah untuk Air Baku Sumba Timur	3.00	Titik	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Rehabilitasi DI Mbaing Sub DI Tanaraing Kab. Sumba Timur	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	41.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	71.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	13.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMP	45.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	REHABILITASI DERMAGA ATAPUPU	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Repowering KN P.528	2.00	UNIT	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Kupang	Perekonomian Masyarakat	Kawasan Mandiri Pangan	1.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Lumbung Pangan Masyarakat	26.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan sarpras pembenihan UPR/HSRT untuk memenuhi kebutuhan benih di lokasi bioflok	18.00	Paket	Kementerian KKP	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	5,750.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	2,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	9,315.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	2.00	Unit	Kementerian Pertanian	-

Fasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Pasar	1.00	Paket	Kementerian Perdagangan	- Dalam tahap penilaian usulan - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Penyediaan Alat Pengolahan Pasca Panen Produk Unggulan Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	35.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	50.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Bendungan Kolhua	1.00	bendungan	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Bendungan Raknamo	1.00	bendungan	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Bendungan Tefmo/Manikin	1.00	bendungan	Kementerian PUPR	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan D.I. Raknamo	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan PSU Rumah Umum	60.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Rumah Susun MBR	42.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Tambak Garam Bipolo	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	32.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	5.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	123.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	18.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	23.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	39.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	76.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	3.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif Tersedianya Bibit Berkualitas
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Timor Tengah Selatan	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	2.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	7.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	5,009.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	2,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirasaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Ekonomi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	84.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	50.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5.00	UNIT	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.00	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Bendungan Temef	1.00	bendungan	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non-status	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan pasar kecamatan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Rumah Susun MBR	42.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	52.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	117.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	26.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	69.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Pranata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Timor Tengah Utara	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	10.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	4,550.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	3,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penumbuhan Wirausahawan di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-

Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengadaan sarana produksi pertanian di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Pasca panen di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengolahan hasil dan pemasaran di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Alat Pengolahan Pasca Panen Produk Unggulan Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Revitalisasi sarana dan prasarana produksi di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	70.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	20.00	Orang	Kementerian Agama	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan dan Peningkatan Bangunan Air	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Embung	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Jembatan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan pasar kecamatan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Sarana dan Prasarana SD	30.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	65.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	15.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	76.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Eksplorasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	1.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Terminal Barang Wini Tahap II	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
	Penunjang	Ukur Bagi Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Belu	Perekonomian Masyarakat	Kawasan Mandiri Pangan	1.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	1,882.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,241.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Pasar	1.00	Paket	Kementerian Perdagangan	- Dalam tahap penilaian usulan - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran

Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Bantuan Sekolah Minggu/Pasraman	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		BOP RA	197.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional	14.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	8.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	1.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	33.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	5.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Pendidikan Agama yang Meningkatkan Kompetensinya	8.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	3.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Lembaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Lembaga Keagamaan yang Difasilitasi	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	2.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Budaya Keagamaan	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Penjaminan Mutu Sekolah Minggu/Pasraman	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Penyediaan Rumah Ibadah yang Sehat dan Bersih	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	51.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	29.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Debuklaran 430 Ha di Kab. Belu (Perbatasan RI -TIMOT LESTE)	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Embung	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Bendungan Rotiklot di Kab.Belu	10.00	km	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan PSU Rumah Umum	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Rumah Khusus Perbatasan	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Jalan Non Status di Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	500.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	12.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	24.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	21.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMP	53.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	4.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Terminal Barang Motaain Tahap II	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Faspel Kendidi Reo	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
		Umat Beragama Yang Dibina	50.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Penunjang	Ukur Bagi Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Alor	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	5.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-

Bantuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Cetak Sawah	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	2,116.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	2,150.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pengembangan Desa Wisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Jaringan Irigasi Tersier	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat Karya Tunai di Kab. Kupang, TTS, TTU, Alor, Sikka, Manggarai Barat Volume 3 paket/kab	3.00	Paket/Kab	Kementerian Ketenagakerjaan	Jenis kegiatan Pembangunan Jalan Desa, Irigasi Desa, Gorong-gorong, Pasar Desa. Pemda diharapkan dapat mengintegrasikan kegiatan padat karya yang terdapat pada alokasi K/L, Provinsi, Kab/kota, Dana Desa dan sumber pendanaan lainnya
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Agrowisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Tanaman Kelapa	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	10.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	1.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	4.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Rehabilitasi Pondok Wisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Jalan Non Status di Daerah Tertinggal dalam Rangka mendukung Prukades	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan pasar kecamatan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Jalan Non Status di Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMA	46.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	18.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	54.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Pembangunan PLTS Pos Pengamat Gunung Api	1.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Faspel Laut Pota	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Peningkatan Fasilitas Umum	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi Tahap III (Selesai) (Termasuk Supervisi)	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Dermaga Penyeberangan Bakalang Tahap II (Termasuk Supervisi)	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Rehabilitasi Hutan mangrove	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
LEMBATA	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	5.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	1,794.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,300.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Bantuan Sekolah Minggu/Pasraman	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		BOP RA	821.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional	160.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	6.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	8.00	Orang	Kementerian Agama	-

Guru ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	20.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	3.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	4.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Pendidikan Agama yang Meningkatkan Kompetensinya	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	2.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Lembaga Keagamaan yang Difasilitasi	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	2.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Budaya Keagamaan	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Penjaminan Mutu Sekolah Minggu/Pasraman	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	40.00	Orang	Kementerian Agama	-

Perangkat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	53.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Non PNS	1.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Bibit Berkualitas
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Umat Beragama Yang Dibina	50.00	Orang	Kementerian Agama	-
ENDE	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	6.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Bantuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	7.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	181.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kakao	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Tanaman Rempah	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan; 2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi; 3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	4.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	480.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	500.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Manggarai	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	11.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	6.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Destinasi Wisata	2.00	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Bantuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan	1.00	KT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	830.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	2,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pengembangan Desa Wisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Agrowisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kopi	140.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Produk Unggulan Daerah Tertinggal Berbasis Inovasi Teknologi Bidang Produksi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	201.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Dokumen Standar Nasional Pendidikan Keagamaan	1.00	Dokumen	Kementerian Agama	-
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional	105.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	8.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	7.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	10.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	2.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Pendidikan Agama yang Meningkatkan Kompetensinya	7.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	3.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Lembaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Budaya Keagamaan	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	80.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	36.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Jalan Non Status di Daerah Tertinggal dalam Rangka mendukung Prukades	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Rehabilitasi Pondok Wisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Sarana dan Prasarana SD	30.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMA	123.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	35.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	42.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahtherimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kab/Kota	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana
		Pengadaan Early Warning System (EWS) Banjir/Longsor	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Bantuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
Rote Ndao	Perekonomian Masyarakat	Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	3,684.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	6,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Agrowisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Ekonomi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Alat Pengolahan Pasca Panen Produk Unggulan Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	2.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-

Petugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	5.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Diusulkan melalui proposal yang ditujukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM; - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran K/L.
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Sudah dialokasikan pada tahun 2016.
		SK PT Rote Ndao 1. pembangunan PPI1 pkt 2. pembangunan UPT SKPT1 pkt 3. Pembangunan tambak garam 10 ha 4. Pembangunan tambak bandeng 10 ha 5. Geomembran 10 ha 6. Kapal < 5 GT 20 unit	1.00	Paket	Kementerian KKP	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	116.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan pasar kecamatan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan PSU Rumah Umum	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bakudi Kabupaten Rote Ndao	3.00	Titik	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Jalan Non Status di Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Rehabilitasi Pondok Wisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Sarana dan Prasarana SMA	41.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	8.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	42.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Eksplorasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
		Revitalisasi PLT EBT	1.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Jalan Nasional Nomor Ruas 004 KM. 210 - Batas Kab. Manggarai (47 Km)	10,000.00	m	Kementerian Perhubungan	-
		Jalan Nasional Nomor Ruas 005 Batas Kab. Manggarai - SP. Bajawa (39 KM)	100.00	UNIT	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Manggarai Barat	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Cetak Sawah	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	4,134.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	1,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	3,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU	1.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	550.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Ekonomi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	175.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.00	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitasi Penyediaan Kapal Barang di Daerah Pulau Kecil dan Terluar	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan dan Pengembangan Permukiman KSPN Labuan Bajo	9.00	HA	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.00	UNIT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penataan Bangunan Kws. Puncak Waringin Kec. Komodo	10,000.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Pengembangan Permukiman Perdesaan Prioritas Nasional di Kab. Manggarai Barat	21.00	HA	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	23.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	44.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	17.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	54.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Internalisasi Konflik Sensitif Planning and Budgeting	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat
		Peningkatan Kohesi Sosial Dalam Pencegahan Konflik	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Sumba Tengah	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	2.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	7.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Cetak Sawah	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	1,313.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	2,604.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Agrowisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	-	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	35.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional	25.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	2.00	Orang	Kementerian Agama	-
			16.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	1.00	Orang	Kementerian Agama	-
			2.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	9.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Pendidikan Agama yang Meningkatkan Kompetensinya	23.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	32.00	Orang	Kementerian Agama	-

KKG/MGMP ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Kelompok Kategorial	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	2.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Budaya Keagamaan	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga kerja Bidang Kesehatan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyuluh Agama	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	19.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Embung Serbabaguna di Prov. NTT	35.00	buah	Kementerian PUPR	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan PSU Rumah Umum	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Tanah untuk Air Baku Sumba Tengah	3.00	titik	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Rehabilitasi Pondok Wisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Sarana dan Prasarana SD	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	13.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	9.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	37.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Eksplorasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahtherimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pengadaan Sea Rider	1.00	UNIT	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Bibit Berkualitas
Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	2.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	4,050.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	1,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	4,350.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 228 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Agrowisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	323.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Gedung dan Bangunan	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional	60.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	4.00	Orang	Kementerian Agama	-
			19.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	8.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	11.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Pendidikan Agama yang Meningkatkan Kompetensinya	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Internalisasi Kurikulum Bina Damai Dalam Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

KKG/MGMP ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	3.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Lembaga Keagamaan yang Difasilitasi	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	2.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Budaya Keagamaan	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga kerja Bidang Kesehatan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	43.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan DI Kodi	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Tanah untuk Air Baku Sumba Barat Daya	3.00	Titik	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	32.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	64.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	50.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	61.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Peningkatan Kohesi Sosial Dalam Pencegahan Konflik	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Nagekeo	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-

Pemberdayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	4,317.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	2,200.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	2.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	210.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional	60.00	Guru	Kementerian Agama	-

Guru ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	8.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	8.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	7.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	8.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Pendidikan Agama yang Meningkatkan Kompetensinya	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Internalisasi Kurikulum Bina Damai Dalam Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	2.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	2.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Budaya Keagamaan	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	42.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS				

Siswa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Siswa MI penerima BOS	572.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	281.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	283.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	43.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Aksesibilitas	Jalan Nasional Nomor Ruas 005 Batas Kab. Manggarai - SP. Bajawa (39 KM)	10,000.00	m	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Peningkatan Kohesi Sosial Dalam Pencegahan Konflik	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Manggarai Timur	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	2.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	4,550.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	2,400.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Agrowisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kakao	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Kopi	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	600.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	2.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	109.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional	162.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	6.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	4.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	16.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	20.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	1.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Pendidikan Agama yang Meningkatkan Kompetensinya	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	3.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Lembaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Budaya Keagamaan	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	70.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan DI Wae Dingin	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan DI. Rotiklot	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Sarana dan Prasarana SD	30.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	147.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	18.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	57.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Eksplorasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Internalisasi Konflik Sensitif Planning and Budgeting	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Peningkatan Kohesi Sosial Dalam Pencegahan Konflik	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Rehabilitasi Hutan mangrove	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Sabu Raijua	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	2.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	649.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	300.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Tanaman Kopi	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Alat Pengolahan Pasca Panen Produk Unggulan Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	25.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional	4.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	8.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Pendidikan Agama yang Meningkatkan Kompetensinya	14.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Budaya Keagamaan	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	40.00	Orang	Kementerian Agama	-

Penyuluh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Embung	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Rehabilitasi Pondok Wisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Sarana dan Prasarana SD	8.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	23.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	5.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	35.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kab/Kota	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-

Dialog ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Malaka	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	10.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	4,408.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	2,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	-	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	71.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional	14.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	3.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	85.00	Orang	Kementerian Agama	-

Guru ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	9.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	1.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Pendidikan Agama yang Meningkatkan Kompetensinya	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	20.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Internalisasi Kurikulum Bina Damai Dalam Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		KKG/MGMP Kyang Menerima Bantuan	2.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Budaya Keagamaan	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Pendidikan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Sarana dan Prasarana pada SMAK	1.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Calon Transmigran (Catrans) dan Penduduk Setempat	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Penyuluh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyuluh Agama	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	42.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	26.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Bangunan Pelengkap PLBN Terpadu Motamasin	5,510.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Jalan Non Status	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan RTJK dan SAB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Jalan Non Status di Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	24.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	79.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMK	6.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	46.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Fasilitas Umum	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kab/Kota	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana
		Pembukaan Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kohesi Sosial Dalam Pencegahan Konflik	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan

Penunjang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Penunjang	Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Ukur Bagi Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

D. Program ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

D. Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Di Wilayah Sulawesi.

Secara umum penyebab ketertinggalan di Wilayah Sulawesi adalah Sumber Daya Manusia, Kemampuan Keuangan Daerah, Perekonomian Masyarakat, Karakteristik Daerah, Sarana dan Prasarana, dan Aksesibilitas. Intervensi kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dibiayai melalui APBN lintas Kementerian/Lembaga di Wilayah Sulawesi antara lain dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -

Tabel 12

Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
Banggai Kepulauan	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	496.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	6.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	400.00	Siswa	Kementerian Agama	-

Guru ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Jalan Non Status Yang dibangun / ditingkatkan di Daerah Tertinggal dalam rangka mendukung Sumber Daya Manusia	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	450.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	20.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	39.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	11.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	42.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Paket Perdana Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	35,000.00	Paket	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
		PMC Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	35,000.00	Paket	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-

Eksplorasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Frans Sales Lega - Ruteng	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara H. Aroeboesman - Ende	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Tambolaka - Waikabubak	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Wunopito - Lewoleba	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyelesaian Konflik Keagamaan	1.00	Kali	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Masuk ke Renja K/L. Biaya pengiriman dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

Rehabilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Rehabilitasi Hutan mangrove	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Sarana dan Prasarana Kerukunan Hidup Umat Beragama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Donggala	Perekonomian Masyarakat	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	8,147.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	3,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	430.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Sulawesi Tengah
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan RTH Kws. Strategis Gunung Bale	1.00	kws	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Baru Rumah Swadaya	100.00	UNIT	Kementerian PUPR	-

Penetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penetapan Batas Badan dan Sempadan Danau Poso	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Jaringan Tata Air Tambak di Kab. Donggala	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	800.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	30.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	34.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	15.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	64.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	3.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara D.C Saudale - Rote	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Desa Tangguh Bencana	2.00	Desa	Kementerian Sosial	Masuk ke Renja K/L.
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Pemberdayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 251 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif Tersedianya Bibit Berkualitas
		siaran radio kebencanaan	1.00	Paket	Kementerian Sosial	Masuk ke Renja K/L.
Toli-Toli	Perekonomian Masyarakat	Cetak Sawah	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	2,254.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	3,025.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	1,000.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	350.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	265.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Fasilitasi Layanan Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Guru ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 252 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	5.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Sulawesi Tengah
		Penyuluh Agama	500.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	55.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	50.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS	2023	Siswa	Kementerian Agama	
		Siswa MI penerima BOS	1,815.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	380.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	435.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	3,420.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	70.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-

Karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 253 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pemulihan ekonomi pasca bencana. pembentukan kelompok dan penentuan komoditas utama (untuk tahun pertama).	1.00	Paket	Kementerian Sosial	Masuk ke Renja K/L.
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Masuk ke Renja K/L. Biaya pengiriman dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
	Penunjang	Penyusunan Materi teknis RDTR Kawasan Perbatasan Negara di Kab Toli-Toli	1.00	Paket	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	-
Buol	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Cetak Sawah	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	4,931.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penumbuhan Wirausahawan di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Pasca panen di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengolahan hasil dan pemasaran di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	29.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Revitalisasi Pasar Rakyat	1.00	Paket	Kementerian Perdagangan	- Dalam tahap penilaian usulan - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran
		Revitalisasi sarana dan prasarana produksi di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Wirausaha tenaga mandiri melalui pola pendampingan	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Masuk ke Renja K/L.
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	191.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Fasilitasi Layanan Sosial di Kawasan Perkotaan Baru	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	400.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Parigi Moutong	Perekonomian Masyarakat	Kawasan Mandiri Pangan	1.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Lumbung Pangan Masyarakat	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	10.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Cetak Sawah	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan	3.00	KT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	10,871.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	4,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	4,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-

Jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 257 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kakao	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	450.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	2.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	465.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Sulawesi Tengah
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	100.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	700.00	UNIT	Kementerian PUPR	-

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 258 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Rehabilitasi DI Lambunu	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	31.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	47.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	22.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	71.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	4.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Bandar Udara Pantar	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan

Masuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 259 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Masuk ke Renja K/L. Biaya pengiriman dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Masuk ke Renja K/L.. jenis rambu bencana sesuai usulan daerah sesuai dengan karakteristik risiko bencana tertinggi di daerah.
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Sarana dan Prasarana Kerukunan Hidup Umat Beragama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		siaran radio kebencanaan	1.00	Paket	Kementerian Sosial	Masuk ke Renja K/L.
Tojo Una-Una	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	4.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Pangan Lokal	1.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Cetak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 260 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Cetak Sawah	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	11,848.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	5,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pengembangan Desa Wisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Jaringan Irigasi Tersier	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	3.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Petugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 261 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan;2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi;3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	4.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan; 2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi; 3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	5.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-

Revitalisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Sudah dialokasikan pada tahun 2018.
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	150.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Sulawesi Tengah
		Penyiapan Calon Transmigran (Catrans) dan Penduduk Setempat	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sarana Dan Prasarana	Penataan Kws. Destinasi Wisata Pulau Togean (KSPN Pulau Togean)	20,000.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pembukaan Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 263 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat
						Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi
		Peningkatan Sarana Pusdalops	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Masuk ke Renja K/L. gedung yang digunakan untuk pusdalops merupakan milik pemerintah daerah dengan luas minimal 6x4m2. BNPB hanya memfasilitasi penyediaan peralatan komputerisasi (server, komputer, GPS, penguatan jaringan sistem informasi) dan penguatan jaringan internet
Sigi	Perekonomian Masyarakat	Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina	2.00	Gapoktan	Kementerian Pertanian	-
		Lumbung Pangan Masyarakat	5.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	5.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-

Bundes ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	10,371.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	6,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	3,500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Kakao	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	2.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	80.00	Siswa	Kementerian Agama	-

Guru ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 265 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	2.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	11.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	9.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kelembagaan sosial budaya di kawasan transmigrasi yang berfungsi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	2.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	1.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	70.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non-status	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	700.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Rehabilitasi DI Gumbasa	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SD	25.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	28.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	4.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	58.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kab/Kota	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Sistem Peringatan Dini Bencana
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Sistem Peringatan Dini banjir	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Masuk ke Renja K/L. Biaya pengiriman dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan

Masuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Masuk ke Renja K/L. Biaya pengiriman dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
		siaran radio kebencanaan	1.00	Paket	Kementerian Sosial	Masuk ke Renja K/L.
	Penunjang	Dukungan SIKD	1.00	Paket	Arsip Nasional Republik Indonesia	Usulan Tambahan K/L. mohon provinsi menentukan 5 kab/kota menentukan simpul jaringan lokus
		Pengurusan sertifikat tanah transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Banggai Laut	Perekonomian Masyarakat	Bantuan Bouy di Kawasan Wisata	1.00	Paket	Kementerian KKP	-
		Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	10.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	785.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-

Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 268 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	258.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kendaraan Bermotor	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	500.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	42.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS				
		Siswa MI penerima BOS	218.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	644.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	21.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-

Karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 269 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Karakteristik Daerah	Dialog Kerukunan Intern Umat	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		pelatihan atau bimbingan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk TRC (Tim Reaksi Cepat)	1.00	Paket	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	-
		Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Aparatur Penanggulangan Bencana yang terlatih
Morowali Utara	Perekonomian Masyarakat	Cetak Sawah	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	3,948.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	3,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	150.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	5.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-

Kendaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 270 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Kendaraan Bermotor	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	3.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	500.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	24.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	95.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS	500.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MI penerima BOS	500.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	1,200.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	44.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Kerukunan Intern Umat	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Penyiapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Masuk ke Renja K/L. Biaya pengiriman dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
Jeneponto	Perekonomian Masyarakat	Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	5.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	25,646.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	3,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	3,500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	2.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Irigasi Perpompaaan dan Perpipaan	5.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	800.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		kegiatan padat karya infrastruktur	3.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	1 Paket untuk 88 orang

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 272 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
						Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Tanaman Kelapa	250.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Tebu	-	HA	Kementerian Pertanian	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan; 2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi; 3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	4.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-

Petugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	4.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan; 2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi; 3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Sudah dialokasikan pada tahun 2018.
	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Sulawesi Selatan
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 274 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SD	1.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	29.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	40.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	53.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	7.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Internalisasi Konflik Sensitif Planning and Budgeting	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
Konawe	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	4.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 275 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	191.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	50.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	700.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		kegiatan padat karya infrastruktur	2.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	1 Paket untuk 88 orang
		Pelatihan TKM	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Masuk ke Renja K/L.
		Pembangunan Embung Pertanian	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Catu pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya

Wirausaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Tanaman Rempah	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	3.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		penyediaan sarpras produksi HHBK di KPHL Laiwoi	1.00	UNIT	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Masuk ke Renja K/L.
	Sumber Daya Manusia	Fasilitasi Layanan Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Kelembagaan sosial budaya di kawasan transmigrasi yang berfungsi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyiapan Calon Transmigran (Catrans) dan Penduduk Setempat	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan IPLT Kab. Konawe Kec.Onembute	2,000.00	KK	Kementerian PUPR	-
		Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.00	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 277 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Jalan Non Status	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan RTJK dan SAB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan sarpras UPTD BIK di Kab Konawe	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Masuk ke Renja K/L.
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	500.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	26.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	28.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	10.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	51.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahtherimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Fasilitas Umum	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 278 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Karakteristik Daerah	Pembukaan Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
	Penunjang	Pengurusan sertifikat tanah transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Ukur Bagi Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
BOMBANA	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan	3.00	KT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	474.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	250.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	600.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		kegiatan padat karya infrastruktur	2.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	1 Paket untuk 88 orang
		Pelatihan TKM	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Masuk ke Renja K/L.
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Tanaman Kelapa	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Tebu	-	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	10.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sarana Dan	Pembangunan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-

Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 280 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Prasarana					
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	400.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	10.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	34.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	11.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	39.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahtherimakan kepada Pemda Setempat	4.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Kajian Risiko Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Masuk ke Renja K/L.
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 281 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Bibit Berkualitas
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Masuk ke Renja K/L. Biaya pengiriman dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
Konawe Kepulauan	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pengembangan Desa Wisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		kegiatan padat karya infrastruktur	2.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	1 Paket untuk 88 orang
		Pelatihan TKM	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Masuk ke Renja K/L.
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 282 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
	Sumber Daya Manusia	Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Rumah Susun MBR	42.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	16.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	30.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Kerukunan Intern Umat	1.00	Kegiatan	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 283 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengadaan Early Warning System (EWS) Banjir/Longsor	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Masuk ke Renja K/L. Biaya pengiriman dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
Boalemo	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Destinasi Wisata	2.00	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pasca Panen Hasil Produksi Pertanian di Kawasan Perdesaan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Masyarakat Miskin	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 284 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	38,899.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	1,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	700.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai Program Jaminan Sosial	1.00	Paket	Kementerian Sosial	Masuk ke Renja K/L
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Catu pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengadaan sarana produksi pertanian di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 285 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Pasca panen di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	350.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Tebu	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengolahan hasil dan pemasaran di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Produk Unggulan Daerah Tertinggal Berbasis Inovasi Teknologi Bidang Produksi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	54.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	1.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-

Revitalisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 286 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Revitalisasi sarana dan prasarana produksi di KP	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	450.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Karakteristik Daerah	Pembukaan Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif Tersedianya Bibit Berkualitas
		Rehabilitasi Hutan mangrove	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Pohuwato	Perekonomian Masyarakat	Kawasan Mandiri Pangan	1.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Lumbung Pangan Masyarakat	5.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	26,281.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 287 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	2,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,561.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Kegiatan SLRT dan pembangunan puskesmas	1.00	Paket	Kementerian Sosial	Dibentuk tahun 2018, Masuk ke Renja K/L
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	-	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	60.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Sumber ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 288 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Gorontalo
	Sarana Dan Prasarana	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.00	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non-status	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan DI Randangan	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Rumah Susun Lembaga Pendidikan Bersama	37.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Sumur Untuk Air baku Lokasi Kabupaten Pohuwato	5.00	Titik	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	400.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	27.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	7.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 289 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMK	11.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	32.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahtherimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	penanaman di wilayah kphl	100.00	HA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Masuk ke Renja K/L.
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Masuk ke Renja K/L. Biaya pengiriman dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
	Penunjang	Ukur Bagi Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Gorontalo utara	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	12.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 290 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan	2.00	KT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	8,944.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	1,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	2,566.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		kegiatan padat karya infrastruktur	2.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	1 Paket untuk 88 orang
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya

Wirausaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 291 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	6.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	1.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan; 2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi; 3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	30.00	Siswa	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	400.00	UNIT	Kementerian PUPR	-

Karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 292 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Karakteristik Daerah	Desa Tangguh Bencana	1.00	Paket	Kementerian Sosial	Masuk ke Renja K/L.
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyelesaian Konflik Keagamaan	1.00	Kali	Kementerian Agama	-
Polewali Mandar	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Pangan Lokal	1.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	16,300.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	2,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU	1.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	450.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-

Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 293 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan perbenihan tanaman hutan	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Masuk ke Renja K/L.
		Pengembangan Tanaman Kakao	270.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	17.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non-status	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial	170.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	500.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	3.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	10.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 294 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMK	60.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	62.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	4.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Desa Tangguh Bencana	1.00	Paket	Kementerian Sosial	Masuk ke Renja K/L.
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana
		pengembangan tanaman di kphl mafili	50.00	HA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Masuk ke Renja K/L.
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan

Masuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 295 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Masuk ke Renja K/L. Biaya pengiriman dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Masuk ke Renja K/L.
		siaran radio kebencanaan	1.00	Paket	Kementerian Sosial	Masuk ke Renja K/L.
Mamuju Tengah	Perekonomian Masyarakat	Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	24,474.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	2,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	1.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penumbuhan Wirausahawan di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-

Pembangunan/Rehabilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 296 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan / Rehabilitasi Irigasi Kawasan	1.00	Kawasan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengadaan Catu pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengadaan sarana produksi pertanian di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Pasca panen di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengolahan hasil dan pemasaran di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	2.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-

Petugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 297 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan; 2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi; 3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	4.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan;2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi;3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	6.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-

Revitalisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 298 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Sudah dialokasikan pada tahun 2016.
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana				- Sudah dialokasikan pada tahun 2017 dan 2018;
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana				- Sudah dialokasikan pada tahun 2018.
		Revitalisasi sarana dan prasarana produksi di KPBB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	Fasilitasi Layanan Sosial di Kawasan Perkotaan Baru	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Kelembagaan sosial budaya di kawasan transmigrasi yang berfungsi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyiapan Calon Transmigran (Catrans) dan Penduduk Setempat	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Bangunan Air	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 299 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non-status	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.00	UNIT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Jalan Non Status	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan RTJK dan SAB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	500.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Rumah Khusus	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	14.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMA	30.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	7.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	54.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Fasilitas Umum	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Bandar Udara Rahadi Oesman - Ketapang	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Peningkatan Fasilitas Umum	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Karakteristik Daerah	Pembukaan Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Penunjang	Pengurusan sertifikat tanah transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Ukur Bagi Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

E. Program ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 301 -

E. Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Di Wilayah Kalimantan.

Secara umum penyebab ketertinggalan di Wilayah Kalimantan adalah Aksesibilitas, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Karakteristik Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah, dan Perekonomian Masyarakat. Intervensi kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang didanai melalui APBN lintas Kementerian/Lembaga di Wilayah Kalimantan antara lain dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 302 -

Tabel 13

Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Kalimantan

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
Sambas	Perekonomian Masyarakat	Kawasan Mandiri Pangan	1.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Lumbung Pangan Masyarakat	8.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	3,500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	8.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Kawasan Aneka Cabai	40.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 303 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Kawasan Bawang Merah	37.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan	20.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Kawasan Jeruk	700.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Kegiatan padat karya infrastruktur	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	okasi masih bersifat tentatif, menyesuaikan usulan daerah melalui e-proposal)
		Kegiatan SLRT dan pembangunan puskesmas	1.00	Paket	Kementerian Sosial	Dibentuk tahun 2018, Masuk ke Renja K/L
		Padat Karya infrastruktur	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	-
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Tanaman Rempah	250.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	10.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Petugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	2.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
			4.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Sudah dialokasikan pada tahun 2016.
						- Sudah dialokasikan pada tahun 2018.
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	523.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Kalimantan Barat
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Pendidikan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sarana Dan Prasarana	Air Baku	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	kegiatan air baku, menyusun DED air minum dan sudah dialokasikan

Jalan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 305 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Jalan Non Status Yang dibangun / ditingkatkan di Daerah Tertinggal dalam rangka mendukung Sumber Daya Manusia	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non-status	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	3.00	UNIT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Kota Sambas	30.34	km	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Jalan Non Status di Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Jaringan Rawa tersebar di Kalimantan Barat (DIR Sebawi dan DIR Teluk Bayur)	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	400.00	UNIT	Kementerian PUPR	-

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 306 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	30.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	41.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	23.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	53.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	4.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Pelabuhan Laut Waikelo	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut BIU	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-

Karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 307 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Karakteristik Daerah	Distribusi Logistik Kebencanaan	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Terdiri dari kantong mayat, makanan siap saji, masker, matras, paket kebersihan keluarga, paket lauk pauk, paket perlengkapan bayi, paket perlengkapan keluarga, paket perlengkapan sekolah, paket tambahan gizi, sandang, selimut, tenda gulung dan tikar
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
	Penunjang	Pengurusan sertifikat tanah transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Ukur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 308 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Ukur Bagi Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Bengkayang	Perekonomian Masyarakat	Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pasca Panen Hasil Produksi Pertanian di Kawasan Perdesaan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Masyarakat Miskin	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	3,750.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	10.00	Unit	Kementerian Pertanian	-

Fasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 309 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Irigasi Perpompaaan dan Perpipaan	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	750.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Pasar	1.00	Paket	Kementerian Perdagangan	- Dalam tahap penilaian usulan - Target dan pagu menyesuaikan ketersediaan anggaran
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK)	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Sarana Prasarana BUM Desa Bersama	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	250.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 310 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyediaan Alat Pengolahan Pasca Panen Produk Unggulan Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	8.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Kelembagaan sosial budaya di kawasan transmigrasi yang berfungsi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sarana Dan Prasarana	Fasilitasi Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	3.00	UNIT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan PLBN Jagoi Babang Kab. Bengkayang	8,900.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	26.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	31.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 311 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMK	12.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	46.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Distribusi Logistik Kebencanaan	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Terdiri dari kantong mayat, makanan siap saji, masker, matras, paket kebersihan keluarga, paket lauk pauk, paket perlengkapan bayi, paket perlengkapan keluarga, paket perlengkapan sekolah, paket tambahan gizi, sandang, selimut, tenda gulung dan tikar
		Pengadaan Early Warning System (EWS) Banjir/Longsor	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif

Penyiapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 312 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
	Penunjang	Pengurusan sertifikat tanah transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Ukur Bagi Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Landak	Perekonomian Masyarakat	Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina	2.00	Gapoktan	Kementerian Pertanian	-
		Lumbung Pangan Masyarakat	9.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	5.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	31,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	5.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-

Jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 313 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	2.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	465.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	48.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	7.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Keluarga yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		KKG/MGMP Kyang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Kelompok Kategorial	3.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	1.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	60.00	Orang	Kementerian Agama	-

Tunjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 314 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	80.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pemantauan Kualitas Air dan Udara	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
		Pembangunan PSU Rumah Umum	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	250.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMA	98.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	19.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	53.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
		Revitalisasi PLT EBT	1.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-

Distribusi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 315 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Distribusi Logistik Kebencanaan	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Terdiri dari kantong mayat, makanan siap saji, masker, matras, paket kebersihan keluarga, paket lauk pauk, paket perlengkapan bayi, paket perlengkapan keluarga, paket perlengkapan sekolah, paket tambahan gizi, sandang, selimut, tenda gulung dan tikar
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
Ketapang	Perekonomian Masyarakat	Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	10.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	5,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 316 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	838.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	2.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Kalimantan Barat
	Sarana Dan Prasarana	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2.00	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan PSU Rumah Umum	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Rumah Susun Lembaga Pendidikan Berasrama	37.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Rumah Susun MBR	42.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 317 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SD	1.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	31.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	32.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	51.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
		Revitalisasi PLT EBT	1.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pelayanan Angkutan Udara Perintis	4.00	RUTE	Kementerian Perhubungan	-
		Peningkatan Fasilitas Umum	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 318 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Karakteristik Daerah	Distribusi Logistik Kebencanaan	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Terdiri dari kantong mayat, makanan siap saji, masker, matras, paket kebersihan keluarga, paket lauk pauk, paket perlengkapan bayi, paket perlengkapan keluarga, paket perlengkapan sekolah, paket tambahan gizi, sandang, selimut, tenda gulung dan tikar
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi
		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 319 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
SINTANG	Perekonomian Masyarakat	Kawasan Mandiri Pangan	1.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	10.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,920.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	5.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	8.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	265.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 320 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Kalimantan Barat
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Jalan Non Status di Daerah Tertinggal dalam rangka mendukung Sarana dan Prasarana / Aksesibilitas	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Kab. Sintang (Lanjutan)	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Jalan Non Status di Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	25.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	64.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	12.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	53.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Eksplorasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 321 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Uumbu Meheng Kunda - Waingapu	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Desa Sadar Kerukunan	1.00	Desa	Kementerian Agama	-
		Desa Tangguh Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-
		Distribusi Logistik Kebencanaan	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Terdiri dari kantong mayat, makanan siap saji, masker, matras, paket kebersihan keluarga, paket lauk pauk, paket perlengkapan bayi, paket perlengkapan keluarga, paket perlengkapan sekolah, paket tambahan gizi, sandang, selimut, tenda gulung dan tikar
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana

Pencegahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 322 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi
	Penunjang	Ukur Bagi Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Kapas Hulu	Perekonomian Masyarakat	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	10,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	414.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional	3.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	3.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	2.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Keluarga yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	30.00	Orang	Kementerian Agama	-

KKG/MGMP ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 323 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		KKG/MGMP yang Menerima Bantuan	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Kelompok Kategorial	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	1.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	57.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS	983	Siswa	Kementerian Agama	
		Siswa MI penerima BOS	2,257.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	181.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	204.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	437.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	820.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	184.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pemantauan Kualitas Air dan Udara	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 324 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	450.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SMA	22.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	5.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	44.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kawasan Perbatasan	1.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Haliwen - Atambua	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro Hidro di sekitar dan di dalam Kawasan Konservasi

Pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 325 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Bibit Berkualitas
Melawi	Perekonomian Masyarakat	Lambung Pangan Masyarakat	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	5,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	5.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pelatihan kewirausahaan	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	45.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	25.00	Orang	Kementerian Agama	-

Lembaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 326 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Lembaga Pendidikan Keagamaan yang memperoleh bantuan operasional	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan yang mendapatkan Intensif	2.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	72.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pemantauan Kualitas Air dan Udara	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
		Pembangunan Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	8.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	20.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 327 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMP	53.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Mali - Alor	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Desa Sadar Kerukunan	1.00	Desa	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Bibit Berkualitas
Kayong Utara	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	5.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penumbuhan Wirausahawan di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Fasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 328 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengadaan Catu pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengadaan sarana produksi pertanian di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Pasca panen di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengolahan hasil dan pemasaran di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Revitalisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 329 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Revitalisasi sarana dan prasarana produksi di KPB	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	64.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Fasilitasi Layanan Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitasi Layanan Sosial di Kawasan Perkotaan Baru	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	2.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kelembagaan sosial budaya di kawasan transmigrasi yang berfungsi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
	Sarana Dan Prasarana	Fasilitasi Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non-status	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	3.00	UNIT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 330 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Jembatan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Pasar Antara Desa/ Kawasan Perdesaan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	10.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	8.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	7.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	35.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Pengendalian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 331 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
	Penunjang	Pengurusan sertifikat tanah transmigrasi	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Ukur Bagi Lahan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Seruyan	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Cetak Sawah	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	51.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	2,119.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 332 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	5.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Kegiatan padat karya dialokasikan	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	-
		Padat karya	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	-
		Pedagang skala mikro informal/pedagang kaki lima yang difasilitasi penataan lokasi sarana usaha dan promosi.	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	2.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-

Petugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 333 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	4.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan; 2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi; 3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Sudah dialokasikan pada tahun 2016
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	140.00	Siswa	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Rumah Susun Lembaga Pendidikan Berasrama	37.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Rehabilitasi Sumur Bor Kab.Seruyan	2.00	Titik	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	10.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	21.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	10.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	37.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Eksplorasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 334 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	6.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan
HULU SUNGAI UTARA	Sumber Daya Manusia	BOP RA	3,001.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Kalimantan Selatan
		Siswa MA penerima BOS	4190	Siswa	Kementerian Agama	
		Siswa MI penerima BOS	10,815.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	252.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	325.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	340.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	369.00	Siswa	Kementerian Agama	-

Siswa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 335 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Siswa MTs penerima BOS	565.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	1,037.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	4,560.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	82.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pemantauan kualitas udara untuk penghitungan IKU	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
Mahakam Ulu	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Jalan Non Status di Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 336 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMA	4.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	28.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kecamatan	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-
		Dukungan Layanan Pendidikan	1.00	Layanan	Kementerian Agama	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penghitungan Indeks Kualitas Udara	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Bibit Berkualitas
		Penyuluh Agama	16.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	10.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	16.00	Orang	Kementerian Agama	-
Nunukan	Perekonomian Masyarakat	Cetak Sawah	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	2,100.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-

Jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 337 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Jaringan Irigasi Tersier	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan PLBN Long Midang	11,800.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan PLBN Sei Pancang Kab. Nunukan	11,865.00	m2	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Krayan Selatan(Ds. Pa Kaber, Ds Liang Lunuk, Ds Pa Yalau, Ds Pa Urang, Ds Pa Tera)	1.00	HA	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan dan Peningkatan Drainase	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non-status	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Embung di Prov. Kalimantan Utara (Sei Fatimah)	1.00	buah	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Rumah Khusus Perbatasan	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-

Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 338 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Peningkatan Jalan Non Status di Daerah Perbatasan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kawasan Sungai Bolong	10.76	HA	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	600.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SMA	15.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	17.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	39.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Karakteristik Daerah	Pengelolaan Kolaboratif KPHL bersama Masyarakat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1 mobil tangki air dan 2 tenda pengungsi
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan

F. Program ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 339 -

F. Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Di Wilayah Jawa.

Secara umum penyebab ketertinggalan di Wilayah Jawa adalah Sumber Daya Manusia. Intervensi kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dibiayai melalui APBN lintas Kementerian/Lembaga di Wilayah Jawa antara lain dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 340 -

Tabel 14

Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Jawa

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
Bondowoso	Perekonomian Masyarakat	Jaringan Irigasi Tersier	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Tanaman Kopi	240.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Tebu	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	5,463.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional	1,471.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	457.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	16.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Keluarga Sakinah yang Terbina	12.00	Pasangan	Kementerian Agama	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 341 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Jawa Timur
		Penyuluh Agama	192.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	105.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	223.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS	6807	Siswa	Kementerian Agama	
		Siswa MI penerima BOS	10,419.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	446.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	1,076.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	12,279.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	184.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

SITUBONDO ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 342 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan	
SITUBONDO	Perekonomian Masyarakat	Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	5,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-	
		Jaringan Irigasi Tersier	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-	
		Pengembangan Tanaman Tebu	550.00	HA	Kementerian Pertanian	-	
	Sumber Daya Manusia	BOP RA		5,642.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional		1,322.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi		498.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi		59.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Keluarga Sakinah yang Terbina		12.00	Pasangan	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas		1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Jawa Timur
		Penyuluh Agama		192.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS		200.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS		1,500.00	Santri	Kementerian Agama	-

Siswa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 343 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Siswa MA penerima BOS	1185	Siswa	Kementerian Agama	
		Siswa MI penerima BOS	8,373.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	240.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	136.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan PSU Rumah Umum	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	30.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	8.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	21.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	49.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 344 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat
		Pranata Adat yang Ditingkatkan Perannya dalam Penanganan Konflik Sosial melalui Festival Budaya dan Sarana Olahraga Desa	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
BANGKALAN	Perekonomian Masyarakat	Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	8,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	250.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	4,939.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional	1,065.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	375.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	92.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Keluarga Sakinah yang Terbina	12.00	Pasangan	Kementerian Agama	-

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 345 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Jawa Timur
		Peningkatan Kapasitas Tenaga kerja Bidang Kesehatan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyuluh Agama	192.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	1,000.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima BOS	350.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	1,500.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS	9,473.00	Siswa	Kementerian Agama	
		Siswa MI penerima BOS	17,000.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	945.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	16,000.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	144.00	Orang	Kementerian Agama	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 346 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	350.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
SAMPANG	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	11.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	4,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	5.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	7,717.00	Siswa	Kementerian Agama	-

Guru ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 347 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Guru Non - PNS penerima Tunjangan Fungsional	2,797.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	888.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	50.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Keluarga Sakinah yang Terbina	12.00	Pasangan	Kementerian Agama	-
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Pendidikan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyuluh Agama	192.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	102.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	669.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS				
		Siswa MI penerima BOS	46,269.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	193.00	Siswa	Kementerian Agama	-

Tunjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 348 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	112.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Pandeglang	Perekonomian Masyarakat	Cetak Sawah	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	50,992.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	20,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	6,200.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	800.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP)	1,010.00	kelompok	Kementerian KKP	-
		Pengembangan Tanaman Kakao	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Banten
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan / Rehabilitasi Irigasi Kawasan	1.00	Kawasan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 349 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	4.00	UNIT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Jalan Kawasan	1.00	km	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Pasar Antara Desa/ Kawasan Perdesaan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Rumah Susun Lembaga Pendidikan Berasrama	37.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengamanan Pantai Jongor, Caringin, dan Kemuning Kab. Pandeglang	0.94	km	Kementerian PUPR	-
		Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Prioritas Nasional Cibaliung	25.00	HA	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1,300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	56.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 350 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMA	12.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	85.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	61.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	53.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
		PMC Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	53.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat
		Pengelolaan Taman Nasional	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sarana Prasarana Ekowisata Taman Nasional Model SBSN
		Penyelesaian Konflik Keagamaan	1.00	Kali	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-

Penyiapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 351 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
Lebak	Perekonomian Masyarakat	Kawasan Mandiri Pangan	1.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Lumbung Pangan Masyarakat	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	7.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	24,481.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	5,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	11,900.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU	1.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	10.00	Unit	Kementerian Pertanian	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 352 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	2.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	700.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	2.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Tanaman Kakao	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	3.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	2.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Sudah dialokasikan pada tahun 2018
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Bendungan Karian	1.00	bendungan	Kementerian PUPR	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 353 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kota Maja	1.00	kab/kota	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Rumah Susun Lembaga Pendidikan Berasrama	37.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	600.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	49.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	48.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	64.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	242.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
		PMC Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	242.00	UNIT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Operasional Terminal Lebak Banten	1.00	Tahun	Kementerian Perhubungan	-

Rehabilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 354 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Lebak di BPTD Wil. VIII Prov. Banten (Termasuk Supervisi)	1.00	pkt	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Kegiatan prioritas Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyelesaian Konflik Keagamaan	1.00	Kali	Kementerian Agama	-

G. Program ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 355 -

G. Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Di Wilayah Sumatera.

Secara umum penyebab ketertinggalan di Wilayah Sumatera adalah Perekonomian Masyarakat, Aksesibilitas, Kemampuan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Karakteristik Daerah, dan Aksesibilitas. Intervensi kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dibiayai melalui APBN lintas Kementerian/Lembaga di Wilayah Sumatera antara lain dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 356 -

Tabel 15

Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
Aceh Singkil	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	5.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	450.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	150.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pengembangan Desa Wisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Jaringan Irigasi Tersier	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	-	UNIT	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	196.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	16.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	5.00	Guru	Kementerian Agama	-

Penyuluh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 357 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyuluh Agama	163.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	20.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima BOS	20.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	95.00	Santri	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS	1,215.00	Siswa	Kementerian Agama	
		Siswa MI penerima BOS	1,050.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	326.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	858.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	83.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Aksesibilitas	Pembangunan jetty PPI Anak Laut dan pabrik es PPI Anak Laut	30.00	Ton	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	-

Karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 358 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Nias	Perekonomian Masyarakat	Bantuan Kapal < S GT	350.00	UNIT	Kementerian KKP	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	866.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	2,460.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	1.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
	Sumber Daya Manusia	Dukungan Layanan Pendidikan	1.00	Layanan	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	26.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 359 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pembangunan Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	250.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	17.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	39.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	20.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	37.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Subsidi Angkutan Udara Perintis	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Nias Selatan	Perekonomian Masyarakat	Bundes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	2,700.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-

Fasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 360 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan Tanaman Kakao	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Kelapa	-	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
	Sumber Daya Manusia	Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 361 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SD	9.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	186.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	55.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	55.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam Tahap II	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Lasondre - Pulau-pulau Batu	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Nias Utara	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	2.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	900.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-

Fasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 362 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	2.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
	Sumber Daya Manusia	Dukungan Layanan Pendidikan	1.00	Layanan	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	24.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	4.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	44.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	44.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	40.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 363 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Nias Barat	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	4.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan peningkatan nilai tambah Prukades di Daerah Tertinggal	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	90.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	100.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Agrowisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya

Wirausaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 364 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
	Sumber Daya Manusia	Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	2.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	5.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Pendidikan Agama yang Meningkatkan Kompetensinya	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	3.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Keluarga yang Memperoleh Bimbingan Keluarga Bahagia	30.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Kendaraan Bermotor	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Lembaga KKG/MGMP yang memperoleh peningkatan Kompetensi	1.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan	15.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	35.00	Siswa	Kementerian Agama	-

Tunjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 365 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	21.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Rehabilitasi Pondok Wisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Sarana dan Prasarana SD	3.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	46.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	32.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	39.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 366 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengadaan Early Warning System (EWS) Banjir/Longsor	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Rehabilitasi Hutan mangrove	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
Kepulauan Mentawai	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	608.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	5.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pengembangan Desa Wisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	1	Paket	Kementerian Pertanian	-

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 367 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	1.00	Paket	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	1.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan;2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi;3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
		SKPT Mentawai Freezer 10 unit Operasional SKPT 12 bulan	1.00	Lokasi	Kementerian KKP	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	433.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi	40.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 368 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	2.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	15.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	34.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Aksesibilitas	Pemb. Faspel Labuhan Bajau, Perpanjangan dermaga Simalepet	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Pengembangan Bandar Udara Sipora - Rokot	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
		Rehab kantor Posker Tiku, Rehab Kantor Wilker Muara Padang, Docking Kapal negara KNP. 346, Pengadaan Mesin Out Boad 85 PK untuk penggantian Mesin KN.P.534	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-
SOLOK SELATAN	Perekonomian Masyarakat	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	100.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-

Jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 369 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Jaringan Irigasi Tersier	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	666.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	7.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	85.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	5.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru/Ustadz Pendidikan Keagamaan Penerima Tunjangan Fungsional	3.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Sumatera Barat
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Bidang Pendidikan	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Penyuluh Agama	16.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS	615	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MI penerima BOS	90.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MI penerima BOS	114.00	Siswa	Kementerian Agama	-

Siswa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 370 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Siswa MI penerima BOS	142.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MI penerima BOS	159.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MI penerima BOS	161.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MI penerima BOS	172.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MI penerima BOS	768.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	195.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	284.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	393.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	425.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	570.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	620.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	1,040.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	61.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Karakteristik Daerah	Dialog Lintas Agama di Kab/Kota	1.00	Dialog	Kementerian Agama	-

Operasional ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 371 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
PASAMAN BARAT	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	7.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	10.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Cetak Sawah	100.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,700.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	9.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Rempah	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 372 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan	1.00	Paket	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Sesuai lampiran indikasi program RTRW Prov Sumatera Sarat (Perda 13 tahun 2012)
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	2.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	3.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	-
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	1,549.00	Siswa	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Fasilitasi Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Pembangunan DI. Batang Bayang	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Pembangunan Rumah Khusus Daerah Tertinggal	50.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Sarana dan Prasarana SD	30.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	31.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 373 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SMK	32.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	42.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Aksesibilitas	Subsidi Operasional Bus Perintis 4 Lintasan	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
	Penunjang	Jaminan Sosial Keluarga (Kab. Pasaman Barat)	1.00	Paket	Kementerian Sosial	-
		Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	1.00	Paket	Kementerian Sosial	-
Musi Rawas	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	18.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Bantuan Permodalan Usaha BUMDesa	5.00	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Bumdes/UMKM di daerah tertinggal yang diberikan peralatan pasca panen	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Cetak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 374 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Cetak Sawah	500.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1.00	Informasi	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	6,084.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	1,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	5,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	20.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	800.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirasaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
		Pengembangan Tanaman Karet	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 375 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	9.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Petugas penyuluh koperasi lapangan	6.00	Orang	Kementerian Koperasi dan UKM	1. Honor PPKL selama 12 bulan; 2. Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan atau mendirikan Koperasi; 3. Melakukan tugas penyuluhan, konsultasi dan bimbingan Koperasi dalam lingkup kab/kota.
	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Sumatera Selatan
	Sarana Dan Prasarana	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non-status	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	400.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Sarana Air Bersih	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-

Sarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 376 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sarana dan Prasarana SD	30.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	41.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	7.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	43.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	2.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
MUSI RAWAS UTARA	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	4.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 377 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	252.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	500.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Karet	-	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Kopi	200.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	25.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	3.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	1.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS				
		Siswa MI penerima BOS	1,920.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	2,114.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	56.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-

Sanitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 378 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Sanitasi	1.00	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
		Sarana dan Prasarana SD	25.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	8.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	3.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	39.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-
SELUMA	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	5.00	kelompok	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	450.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1,088.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	7.00	Unit	Kementerian Pertanian	-

Fasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 379 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	450.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	1.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan paska bencana	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	- Sudah dialokasikan pada tahun 2018.
	Sumber Daya Manusia	BOP RA	379.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	93.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	17.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	3.00	Guru	Kementerian Agama	-
		Keluarga Sakinah yang Terbina	1.00	Pasangan	Kementerian Agama	-
		Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD di Provinsi Bengkulu
		Penyuluh Agama	1.00	Orang	Kementerian Agama	-

Perangkat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 380 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5.00	UNIT	Kementerian Agama	-
		Siswa MA penerima BOS	503	Siswa	Kementerian Agama	
		Siswa MI penerima BOS	1,428.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Siswa MTs penerima BOS	75.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	114.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan DI Air Seluma dan Air alas Kab. Seluma	1.00	Paket	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	300.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
	Karakteristik Daerah	Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
Lampung Barat	Perekonomian Masyarakat	Lumbung Pangan Masyarakat	3.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan	2.00	KT	Kementerian Pertanian	-

Fasilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 381 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	3,697.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	-	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Jaringan Irigasi Tersier	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pedagang skala mikro informal/pedagang kaki lima yang difasilitasi penataan lokasi sarana usaha dan promosi.	1.00	UNIT	Kementerian Koperasi dan UKM	-
		Pembangunan Embung Pertanian	1.00	UNIT	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan Tanaman Kopi	400.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	2.00	HA	Kementerian Pertanian	-
	Sumber Daya Manusia	Bantuan Sekolah Minggu/Pasraman	2.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		BOP RA	1,448.00	Siswa	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Penataan Kebun raya Liwa	1.00	kws	Kementerian PUPR	-
		Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	200.00	UNIT	Kementerian PUPR	-

Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 382 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Penyediaan Infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) - BAKTI SINYAL	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Penyediaan Layanan Akses Internet	1.00	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-
		Revitalisasi sentra IKM	1.00	Paket	Kementerian Perindustrian	-
		Sarana dan Prasarana SD	5.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	21.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	27.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	45.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Eksplorasi Dan Pelayanan Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk Diserahterimakan kepada Pemda Setempat	1.00	Titik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-
	Karakteristik Daerah	Alat kebencanaan anggamus	1.00	Mobil	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-
		Desa Tangguh Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-

Pemberdayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 383 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-
		Penyiapan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan
Pesisir Barat	Perekonomian Masyarakat	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	1,437.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	1,000.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	3,474.00	Hektar	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	5.00	Unit	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani	1.00	Layanan	Kementerian Pertanian	-
		Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pengembangan Desa Wisata	1.00	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-
		Jaringan Irigasi Tersier	300.00	HA	Kementerian Pertanian	-
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Kegiatan Padat Karya

Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 384 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.00	Paket	Kementerian Ketenagakerjaan	Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri melalui Pola Pendampingan
	Sumber Daya Manusia	Bantuan Sekolah Minggu/Pasraman	2.00	Lembaga	Kementerian Agama	-
		BOP RA	487.00	Siswa	Kementerian Agama	-
		Guru PA Penerima Insentif	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Penyuluh Agama	69.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh Agama Non-PNS (PN)	56.00	Orang	Kementerian Agama	-
		Tunjangan Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Non PNS	5.00	Orang	Kementerian Agama	-
	Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	850.00	UNIT	Kementerian PUPR	-
		Sarana dan Prasarana SD	62.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMA	11.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMK	11.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
		Sarana dan Prasarana SMP	44.00	Paket	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-

Aksesibilitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 385 -

Kabupaten	Kriteria	Output Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga	Keterangan
	Aksesibilitas	Pengembangan Bandar Udara Pekonserai	1.00	Paket	Kementerian Perhubungan	-
	Karakteristik Daerah	Desa Tangguh Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-
		Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota	1.00	Lokasi	Kementerian Agama	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana	1.00	Paket	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Desa Tangguh Bencana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 386 -

BAB IV
PENUTUP

Demikian RAN-PPDT Tahun 2019 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Instansi Pusat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi rencana kerja Instansi Pusat setiap tahun terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal; pemerintah daerah provinsi dalam penyusunan RAD-PPDT Provinsi; pemerintah daerah kabupaten dalam penyusunan RAD-PPDT Kabupaten; dan pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Diharapkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sebagaimana yang tertuang RAN-PPDT Tahun 2019 untuk mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana yang tertuang dalam STRANAS-PPDT Tahun 2015-2019.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,

